

**PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAH, KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA,
PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL,
KOMITMEN ORGANISASIONAL, PEMANFAATAN
TEKNOLOGI INFORMASI, DAN REKONSILIASI
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH**

**(STUDI EMPIRIS PADA SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN SLEMAN)**



SKRIPSI

Oleh:

Nama : Tertia Ulima Rahma

No. Mahasiswa : 15312411

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2019

**PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH,
KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PENERAPAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERNAL, KOMITMEN ORGANISASIONAL,
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN REKONSILIASI
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH**

**(STUDI EMPIRIS PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SLEMAN)**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai
derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi UII

Oleh:

Nama : Tertia Ulma Rahma

No. Mahasiswa : 15312411

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2019

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 08 Maret 2019

Penulis,



(Tertia Ulina Rahma)

**PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH,
KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PENERAPAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERNAL, KOMITMEN ORGANISASIONAL,
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN REKONSILIASI
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH**

**(STUDI EMPIRIS PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SLEMAN)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Nama : Tertia Ulima Rahma

No. Mahasiswa : 15312411

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 06 Maret 2019

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Marfuah', with a long horizontal stroke extending to the left.

(Marfuah, Dra., M.Si., Ak.)

HALAMAN BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

PENGARUH IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, KOMITMEN ORGANISASIONAL, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN REKONSILIASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (ST

Disusun Oleh : **TERTIA ULIMA RAHMA**
Nomor Mahasiswa : **15312411**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Selasa, tanggal: 9 April 2019

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Marfuah, Dra.,M.Si.,Ak,Cert.SAP.

Penguji : Noor Endah Cahyawati, SE, M.Si, Cert. SAP.

Handwritten signature of Marfuah
.....
Handwritten signature of Noor Endah Cahyawati
.....

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia

Jaka Suryana, SE., M.Si, Ph.D.

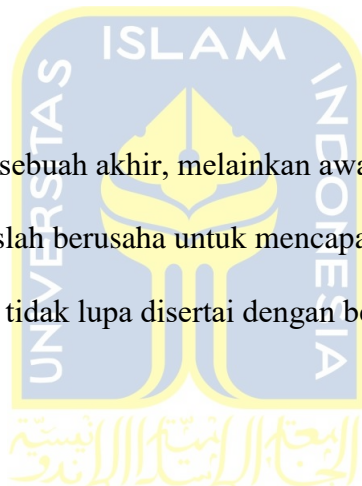
MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan” - Q.S. Al-Insyirah: 5-6

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya.” – Q.S.

Al-Baqarah: 286

“Kegagalan bukanlah sebuah akhir, melainkan awal untuk mencapai akhir yang lebih baik, maka teruslah berusaha untuk mencapai akhir yang diharapkan dan tidak lupa disertai dengan berdoa”



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, skripsi yang telah disusun ini penulis persembahkan kepada :

Bapak Sugiyanto dan Ibu Setiyati selaku kedua Orang Tua penulis yang selalu mendoakan dan mendukung penulis agar skripsi ini dapat segera terselesaikan dan lulus secepatnya.

Kedua kakak penulis Arlis Laga Zonanda dan Albi Lasano

Kepada Universitas tercinta, Universitas Islam Indonesia



KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas limpahan berkat, rahmat, nikmat, rezeki, serta karunia-Nya, tak lupa shalawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Internal, Komitmen Organisasional, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Rekonsiliasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sleman)”**. Penelitian itu ditujukan untuk memenuhi tugas akhir yaitu skripsi sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Program Strata 1 program studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Dalam proses penyusunan skripsi, tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, maupun dukungan dari beberapa pihak, sehingga persoalan yang dihadapi dapat terpecahkan dan diatasi dengan baik. Selanjutnya melalui kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada:

1. Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya selalu memberikan kekuatan, kesehatan, kemudahan, kelancaran, dan pertolongan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

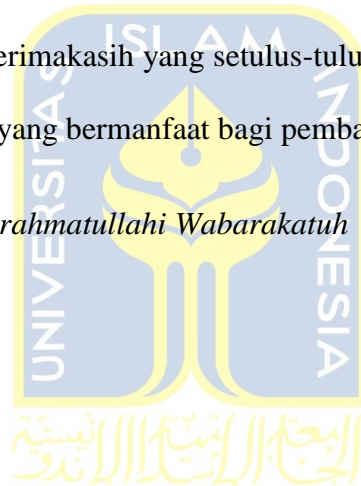
2. Bapak Sugiyanto dan Ibu Setiyati selaku kedua orangtua penulis yang selalu setia memberikan dukungan, doa, dan dorongan motivasi serta segala pengorbanan yang telah diberikan demi kelancaran dan kesuksesan anaknya.
3. Arlis Laga Zonanda dan Albi Lasano selaku kedua kakak penulis yang selalu memberikan semangat, kebahagiaan dan dorongan motivasi dalam setiap waktu.
4. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Jaka Sriyana, S.E., M.Si., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Dr. Mahmudi, S.E., M.Si., Ak. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Islam Indonesia yang telah mendukung dalam penyelesaian studi.
7. Ibu Dra. Marfuah, M.Si., Ak. selaku dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi yang telah memberikan bimbingan, nasihat, kritikan, maupun masukan, serta memberikan waktu yang berharga kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada Bapak/Ibu Dosen Jurusan Akuntansi, atas segala ilmu yang telah diberikan kepada penulis, serta para pegawai perpustakaan FE UII, Bapak/Ibu pegawai dan *staff* keluarga besar Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang secara tidak langsung telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

9. Untuk Devi Oktia Anggraini, Azimatul Ulya, Fayla Dewi Febriana, Azizah Aprilia Utami, dan Putri Nur Diwanti temen seperjuangan dari semester awal hingga akhir yang selalu menemani dalam suka maupun duka dan selalu memberikan semangat, senyum, tawa dimanapun dan kapanpun. Kalian terbaik.
10. Untuk Kak Ningrum dan Kak Euis, atas informasi yang sangat membantu dan dukungan yang selalu diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Untuk Amanda Pramesti, atas dukungan dan bantuannya sehingga dapat menyelesaikan skripsi bersama-sama dimulai dari awal penentuan judul hingga sidang skripsi.
12. Teman-teman satu bimbingan skripsi yang saling mendukung dan saling membagikan informasi yang sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Teman-teman KKN angkatan 57 khususnya Unit 261, atas waktu dan kenangan yang tidak akan terlupakan dan dukungan serta doanya.
14. Keluarga besar Koperasi Mahasiswa Fakultas Ekonomi UII yang memberikan banyak pengalaman, kenalan, dan pelajaran untuk menjadi pribadi yang lebih baik.
15. Keluarga besar Akuntansi angkatan 2015, dan Fakultas Ekonomi UII yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas bantuan dan dukungannya.

16. Untuk Eka Kartika Kusumawati, Ayu Dini Lestari, Pramesti Puteri Pertiwi, Lusyana Dwi Allita, dan Nurrafi Aliya Khasanah yang telah memberikan dukungan dan doa meskipun terpisah jarak bahkan pulau, terimakasih atas dukungannya dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar penulis dapat memperbaiki kesalahan yang ada dan dapat meningkatkan kemampuan berkarya agar lebih baik lagi. Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya. Semoga skripsi ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Yogyakarta, 08 Maret 2019

Penulis,

(Tertia Ulima Rahma)

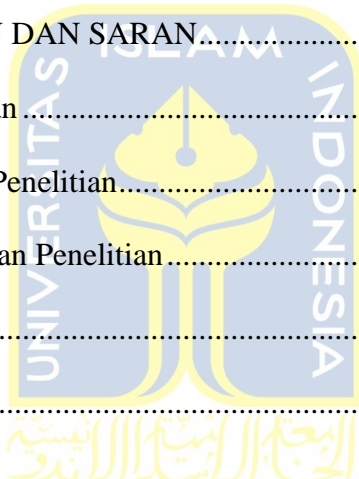
DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Judul.....	ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme	iii
Halaman Pengesahan	iv
Halaman Berita Acara Ujian Skripsi.....	v
Halaman Motto.....	vi
Halaman Persembahan	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi.....	xii
Daftar Tabel	xvi
Daftar Gambar.....	xvii
Daftar Lampiran	xvii
Abstrak	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 Laporan Keuangan	10
2.1.2 Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah.....	16

2.1.3	Kompetensi Sumber Daya Manusia.....	17
2.1.4	Penerapan Sistem Pengendalian Internal	18
2.1.5	Komitmen Organisasional.....	20
2.1.6	Pemanfaatan Teknologi Informasi	21
2.1.7	Rekonsiliasi.....	23
2.2	Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	23
2.3	Hipotesis Penelitian	28
2.3.1	Pengaruh Implementasi SAP.....	28
2.3.2	Pengaruh Kompetensi SDM.....	29
2.3.3	Pengaruh Penerapan SPI	31
2.3.4	Pengaruh Komitmen Organisasional.....	32
2.3.5	Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi	34
2.3.6	Pengaruh Rekonsiliasi.....	35
2.4	Kerangka Konseptual.....	36
BAB III METODE PENELITIAN.....		37
3.1	Populasi dan Sampel Penelitian	37
3.2	Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.3	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel	39
3.3.1	Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	39
3.3.2	Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah	40
3.3.3	Kompetensi Sumber Daya Manusia.....	42
3.3.4	Sistem Pengendalian Internal.....	43
3.3.5	Komitmen Organisasional.....	44

3.3.6	Pemanfaatan Teknologi Informasi	44
3.3.7	Rekonsiliasi	45
3.4	Hipotesis Operasional	46
3.5	Metode Analisis Data	48
3.5.1	Uji Kualitas Data.....	49
3.5.2	Uji Asumsi Klasik.....	50
3.5.3	Analisis Regresi	52
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		55
4.1	Gambaran Umum Responden	55
4.1.1	Deskripsi Objek.....	55
4.1.2	Deskripsi Responden.....	58
4.1.3	Deskripsi Data Penelitian.....	59
4.2	Uji Kualitas Data.....	64
4.2.1	Uji Reliabilitas	64
4.2.2	Uji Validitas	65
4.3	Uji Asumsi Klasik	70
4.3.1	Uji Normalitas	70
4.3.2	Uji Multikolinearitas	71
4.3.3	Uji Heteroskedastisitas.....	72
4.4	Uji Hipotesis	73
4.4.1	Koefisien Determinan (R^2).....	73
4.4.2	Uji Kelayakan (Uji F).....	74
4.4.3	Uji T	74

4.5	Hasil Uji Hipotesis	76
4.6	Pembahasan.....	78
4.6.1	Pengaruh Implementasi SAP.....	78
4.6.2	Pengaruh Kompetensi SDM.....	80
4.6.3	Pengaruh Penerapan SPI	82
4.6.4	Pengaruh Komitmen Organisasional.....	83
4.6.5	Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi	85
4.6.6	Pengaruh Rekonsiliasi.....	87
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		88
5.1	Kesimpulan	88
5.2	Implikasi Penelitian.....	89
5.3	Keterbatasan Penelitian.....	90
5.4	Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA		92
LAMPIRAN.....		96



DAFTAR TABEL

4.1	Tabel Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner.....	56
4.2	Tabel Daftar Distribusi Kuesioner.....	56
4.3	Tabel Daftar Karakteristik Responden	59
4.4	Tabel Hasil Pengujian Statistik Deskriptif	60
4.5	Tabel Uji Reliabilitas.....	64
4.6	Tabel Uji Validitas Variabel Kualitas Laporan Keuangan	66
4.7	Tabel Uji Validitas Variabel Implementasi SAP.....	66
4.8	Tabel Uji Validitas Variabel Kompetensi SDM.....	67
4.9	Tabel Uji Validitas Variabel Penerapan SPI.....	68
4.10	Tabel Uji Validitas Variabel Komitmen Organisasional.....	68
4.11	Tabel Uji Validitas Variabel Pemanfaatan TI	69
4.12	Tabel Uji Validitas Variabel Rekonsiliasi	69
4.13	Tabel Hasil Uji Normalitas	70
4.14	Tabel Hasil Uji Multikolinearitas	71
4.15	Tabel Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	72
4.16	Tabel Uji <i>R Square</i>	73
4.17	Tabel Uji Anova	74
4.18	Tabel Uji Statistik F.....	75
4.19	Tabel Hasil Uji Hipotesis.....	76

DAFTAR GAMBAR

2.1 Gambar Kerangka Konseptual	36
--------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Kuesioner Penelitian.....	96
Lampiran 2: Tabulasi Data.....	108
Lampiran 3: Uji Validitas dan Reliabilitas.....	134
Lampiran 4: Uji Normalitas	151
Lampiran 5: Uji Multikolinearitas	152
Lampiran 6: Uji Heteroskedastisitas	152
Lampiran 7: Uji Hipotesis.....	153
Lampiran 8: Uji Statistik Deskriptif.....	154



ABSTRACT

This study aims to determine the effect of implementation of government accounting standards (SAP), competency of human resources, implementation of internal control systems, organizational commitment, utilization of information technology, and reconciliation towards the quality of local government financial reports in Sleman Regency. The method of determining the sample using purposive sampling method and the number of samples used in the study were 127 respondents. Data collection was done by distributing questionnaires to the financial/accounting management department in several OPDs in Sleman Regency and processed using SPSS Statistics 23.0. The results showed that the implementation of government accounting standards (SAP), competency of human resources, implementation of the internal control systems, utilization of information technology, and reconciliation significantly affected the quality of local government financial reports. The opposite results are shown by organizational commitment that does not significantly influence the quality of local government financial reports.

Keywords: implementation of government accounting standards (SAP), competency of human resources, implementation of internal control systems, organizational commitment, utilization of information technology, reconciliation, and local government financial reports.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh implementasi standar akuntansi pemerintah, kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem pengendalian internal, komitmen organisasional, pemanfaatan teknologi informasi, dan rekonsiliasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Sleman. Metode penentuan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dan jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian sebanyak 127 responden. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner ke bagian pengelolaan keuangan/akuntansi di beberapa OPD di Kabupaten Sleman dan diolah menggunakan SPSS *Statistic* 23.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi standar akuntansi pemerintah, kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan rekonsiliasi berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil sebaliknya ditunjukkan oleh komitmen organisasional yang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kata Kunci : Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Internal, Komitmen Organisasional, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Rekonsiliasi, dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tuntutan akan akuntabilitas terhadap pemerintah baik pusat maupun daerah menjadi fenomena yang perlu diperhatikan saat ini. Menurut Mardiasmo (2006) yang dimaksud akuntabilitas adalah bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilakukan secara periodik. Pemerintah daerah dipercaya oleh masyarakat untuk menjalankan roda pemerintahan di daerah yang dipegang wajib mempertanggungjawabkan program atau kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu periode. Program yang telah tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) harus di pertanggungjawabkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang merupakan wakil rakyat. Wujud dari pertanggungjawaban pemerintah dapat dilihat dari penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah yang disusun mengikuti prinsip-prinsip dan kaidah yang berlaku.

Praktek pelaporan keuangan dalam pemerintah daerah ini didasari oleh teori keagenan. Pemerintah sebagai agen memiliki kewajiban untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna yang bertindak sebagai prinsipal dalam menilai akuntabilitas. Informasi tersebut disajikan dalam bentuk Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dan hasil yang tercantum dalam laporan keuangan diharapkan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Menurut PSAK nomor 45 menyatakan bahwa tujuan utama dari laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota organisasi, kreditur, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi organisasi nirlaba khususnya pemerintah. Selain pihak-pihak yang telah disebutkan sebelumnya, masyarakat juga termasuk subyek yang harus dipenuhi kebutuhan akan informasi mengenai kinerja pemerintah daerah yang tertuang dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

LKPD dapat digunakan pula sebagai dasar pertimbangan dalam pembuatan anggaran untuk periode selanjutnya. Oleh karena itu, diharapkan dalam penyusunan LKPD harus mengikuti standar yang berlaku yaitu Standar Akuntansi Pemerintah agar laporan yang dihasilkan berkualitas baik. Peraturan Pemerintah (PP) nomor 71 tahun 2010 menyatakan bahwa untuk memenuhi standar kualitas dari informasi yang terdapat dalam laporan keuangan, maka laporan keuangan pemerintah daerah tersebut harus memenuhi beberapa karakteristik, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Kualitas LKPD tersebut dapat dibuktikan dari hasil audit yang telah dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berupa opini. Opini terdapat empat macam, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar, dan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP). Menurut hasil audit LKPD pada 2016, dari 542 LKPD yang telah diperiksa

terdapat 378 LKPD yang mendapat opini WTP, 141 LKPD memperoleh opini WDP dan 23 LKPD yang mendapat opini TMP. Terdapat kenaikan LKPD yang meraih opini WTP sebesar 12 persen yaitu dari 58 persen pada LKPD tahun 2015 menjadi 70 persen pada LKPD 2016.

Laporan keuangan yang baik dapat dihasilkan dari beberapa faktor. Salah satunya adalah penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berlaku dalam penyusunan LKPD. SAP yang digunakan sebagai pedoman penyusunan LKPD adalah Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 yang merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005. Jika SAP diterapkan secara tertib dan benar, maka laporan keuangan diharapkan dapat dihasilkan dengan kualitas yang baik. Namun, pada realisasinya masih banyak daerah yang belum menerapkan SAP dengan benar sehingga mempengaruhi kualitas dari LKPD yang dihasilkan. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Suwanda (2015) yang menyatakan bahwa SAP memberikan pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Namun, hasil penelitian tersebut bertentangan dengan hasil penelitian Nurlis (2018) yang menyatakan bahwa implementasi SAP tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan.

Dalam penerapan SAP yang baik dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi yang memadai. Kompetensi tersebut dapat dilihat dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dimiliki oleh subyek. Jika subyek tidak memiliki kompetensi yang memadai maka dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Pradono & Basukianto (2015), Siahaya, Asnawi, & Layuk (2017), Astika dan Yasa

(2018), serta Abidin, Afifudin, & Junaidi (2018). Namun, hasil penelitian tersebut bertentangan dengan hasil penelitian Suwanda (2015), Erawati dan Abdulhadi (2018), dan Aswandi (2018) yang menyatakan bahwa kompetensi SDM tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Faktor lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah penerapan sistem pengendalian internal. Jika sistem pengendalian internal tidak dilakukan secara optimal maka dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Pradono & Basukianto (2015), Dimiyati, Paramu, & Trisnani (2017), Siahaya, Asnawi, & Layuk (2017), Astika dan Yasa (2018), serta Ningrum (2018) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Namun, hasil penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suwanda (2015) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal tidak memberikan pengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Komitmen organisasional juga menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Jika diantara pemimpin dan pengikut dapat membangun komitmen yang baik maka dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Suwanda (2015), Modo, Poputra, & Saerang (2016) yang menyatakan bahwa komitmen organisasional memberikan pengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Namun, hasil yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian yang

dilakukan Astika dan Yasa (2018). Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa komitmen organisasional terbukti tidak mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

Faktor kelima yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi yang semakin baik akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Pernyataan tersebut didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Pradono & Basukianto (2015), Erawati dan Abdulhadi (2018), dan Alamsyah, Muslih, & Rahayu (2018) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Namun, hasil yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Suwanda (2015), Handayani dan Surastiani (2015), Aswandi (2018), Wahyuni, Fadah, & Tobing (2018) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi (TI) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Faktor keenam yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah rekonsiliasi. Semakin rutin melakukan rekonsiliasi maka mendukung baiknya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan Pradono & Basukianto (2015).

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD yang diserahkan Kepala Perwakilan BPK Provinsi DIY Yusnadewi, menyatakan bahwa LKPD tahun 2017 Kabupaten Sleman meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK. Opini WTP akan LKPD tersebut telah diraih Kabupaten Sleman dari tahun 2011 hingga tahun 2017. Tahun 2016, Kabupaten Sleman merupakan satu-satunya dari empat kabupaten dan kota di DIY yang mendapat opini WTP tanpa disertai paragraf

penjelasan atau catatan tambahan. Kesuksesan akan opini yang diraih tidak luput dari beberapa faktor, yaitu penerapan SAP, kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem pengendalian internal, komitmen organisasional, pemanfaatan teknologi informasi, dan penerapan rekonsiliasi.

Berdasarkan fenomena yang terjadi saat ini dan didukung dengan perbedaan hasil penelitian yang diperoleh peneliti sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah daerah yang akan digunakan untuk menjadi sampel yaitu seluruh pengelola keuangan pada beberapa Organisasi Pengelola Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Sleman, karena penelitian sebelumnya dilakukan di Provinsi Jawa Barat. Dalam penelitian ini juga menambahkan penerapan rekonsiliasi sebagai variabel independen. Perbedaan hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti sebelumnya dapat diakibatkan oleh perbedaan daerah yang digunakan dalam penelitian. Oleh karena itu, penulis memutuskan untuk melakukan penelitian yang berjudul : “PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, KOMITMEN ORGANISASIONAL, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN REKONSILIASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI PADA SKPD KABUPATEN SLEMAN).”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
4. Apakah komitmen organisasional dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
5. Apakah pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
6. Apakah rekonsiliasi dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

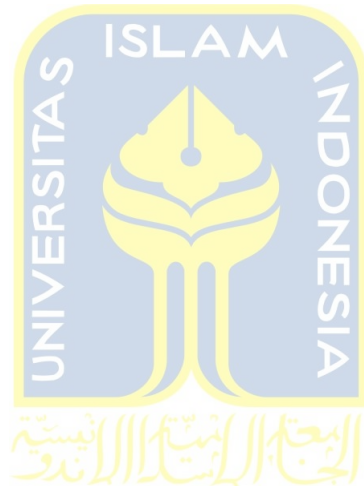
2. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Untuk mengetahui pengaruh penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
4. Untuk mengetahui pengaruh Komitmen Organisasional terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
5. Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
6. Untuk mengetahui pengaruh rekonsiliasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan literatur akuntansi yang telah ada dan memperkuat hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini dapat juga digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya dan menjadi dasar dalam mengembangkan penelitian mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

2. Bagi pemerintah daerah dan praktisi lainnya, dapat menambah wawasan mengenai pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Sistem Pengendalian Internal (SPI), komitmen organisasional, pemanfaatan Teknologi Informasi (TI), dan rekonsiliasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil dari penelitian ini juga dapat digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Laporan Keuangan

2.1.1.1 Pengertian Laporan Keuangan

Secara umum, laporan keuangan merupakan bentuk akuntabilitas dari sumber ekonomi yang dibuat oleh suatu entitas. Laporan keuangan disusun berdasarkan standar yang telah ditetapkan dan berlaku di suatu negara dimana laporan keuangan tersebut dibentuk. Laporan keuangan disusun berdasarkan standar yang berlaku dan diterbitkan secara umum agar dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya ataupun dibandingkan dengan laporan keuangan yang diterbitkan oleh entitas yang satu dengan entitas yang lainnya. Pelaporan keuangan merupakan produk akhir dari proses akuntansi yang didalamnya terdapat laporan keuangan.

Menurut Weygandt, Kieso, dan Kell (1996:80) menyatakan bahwa akuntansi adalah proses yang terdiri dari mengidentifikasi, mencatat dan mengomunikasikan kejadian ekonomi dari organisasi (bisnis maupun non-bisnis) kepada pengguna informasi yang berkepentingan. Segala transaksi keuangan diidentifikasi, dicatat dan dilaporkan secara periodik dalam bentuk laporan keuangan dan digunakan dalam penilaian dan pembuatan keputusan ekonomi, sosial maupun politik yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Menurut Horngren, Harrison, dan Bamber (2002:63) menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan dalam bentuk moneter dan menyediakan informasi yang membantu dalam pembentukan keputusan. Laporan keuangan disajikan dalam beberapa bentuk laporan. Hal ini berdasarkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2012) yang menjelaskan bahwa laporan keuangan yang lengkap secara umum terdiri dari neraca, laporan laba/rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Selain itu, juga terdapat catatan tambahan yang berhubungan dengan pelaporan, seperti informasi keuangan industri.

Kesimpulan dari uraian diatas adalah laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang berisi informasi kondisi keuangan pada periode tertentu yang disajikan dalam bentuk moneter. Laporan keuangan tersebut digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk membuat keputusan dan disajikan secara lengkap yang terdiri dari neraca, laporan laba/rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

2.1.1.2 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Tidak hanya organisasi sektor privat yang perlu membuat laporan keuangan eksternal, namun organisasi sektor publik juga diminta membuat laporan keuangan untuk pihak eksternal. Laporan keuangan untuk sektor publik dapat diadaptasi dari laporan keuangan untuk sektor privat yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan publik. Meskipun diadaptasi dari sektor

privat, laporan keuangan sektor publik tidak dapat disamakan seluruhnya dengan sektor privat karena bentuk elemen dan orientasi dari laporan keuangan yang berbeda. Dalam sektor publik, orientasi dari pembuatan laporan keuangan tidak berpatokan untuk mencari laba, namun ditujukan untuk sosial dan politik. Standar yang digunakan untuk menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan antara sektor privat dengan publik berbeda.

Khususnya sektor publik dalam hal pemerintah, terdapat standar sendiri yang mengatur dalam penyusunan laporan keuangan. Standar yang mengatur penyusunan laporan keuangan pemerintah disebut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). SAP didasarkan pada PP No. 71 Tahun 2010. Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010, "Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan". Laporan keuangan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah disebut Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Menurut Haryanto, dkk. (2007:17) menjelaskan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) merupakan kombinasi dari laporan keuangan konsolidasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). LKPD disusun oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dengan tenggang waktu tidak lebih dari tiga bulan setelah berakhirnya periode berjalan. LKPD disusun berdasarkan pada SAP dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran, laporan finansial dan catatan atas laporan keuangan (CaLK). Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL). Laporan finansial terdiri dari Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Laporan Arus Kas (LAK). CaLK merupakan rincian atau penjelasan lebih lanjut atas pos-pos yang terdapat dalam laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial. CaLK merupakan laporan yang tidak dapat dipisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial. Dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 dijelaskan adanya delapan basis yang digunakan dalam pelaporan keuangan, yaitu basis akuntansi, nilai historis, realisasi, substansi mengungguli bentuk formal, periodisitas, konsistensi, pengungkapan lengkap, dan penyajian wajar. Delapan basis ini digunakan untuk menyusun laporan keuangan yang terdiri dari beberapa komponen untuk memenuhi tujuan dari laporan keuangan pemerintah. Menurut Rahmadani (2015) tujuan dari laporan keuangan khususnya laporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan sebuah informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja suatu entitas dalam proses pelaporan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan dapat digunakan oleh semua pengguna dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

2.1.1.3 Kualitas Laporan Keuangan

Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan dapat dikatakan bermanfaat bagi penggunanya dan berkualitas jika dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Untuk mendapatkan informasi yang berkualitas,

laporan keuangan tersebut haruslah disusun dengan memenuhi karakteristik kualitatif yang telah ditetapkan. Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010, karakteristik kualitatif merupakan ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi dan terdiri dari empat karakteristik. Keempat karakteristik ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar kualitas laporan keuangan pemerintah dapat dipenuhi sesuai dengan yang dikehendaki. Keempat karakteristik tersebut, yaitu :

1. Relevan

Laporan keuangan dapat dikatakan relevan apabila informasi yang terkandung didalamnya dapat digunakan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pengguna ataupun manajerial. Informasi tersebut digunakan untuk membantu pengguna dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi dikatakan relevan jika memiliki manfaat umpan balik, memiliki manfaat prediktif, tepat waktu, dan lengkap.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan dikatakan andal apabila bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, dapat diverifikasi dan informasi bersifat netral diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak.

3. Dapat Dibandingkan

Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan akan lebih berguna bila dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

4. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dikatakan bermanfaat apabila dapat dipahami oleh pengguna. Informasi yang disajikan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk memahami dan mempelajari informasi yang dimaksud.

Apabila Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disajikan telah memenuhi karakteristik kualitatif yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, maka pemerintah daerah sudah mampu mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan belum memenuhi karakteristik kualitatif yang telah ditetapkan, maka dapat mempengaruhi hasil opini yang akan dilaporkan oleh auditor pemerintah yaitu Badan Pemeriksa Keuangan dan akan mendatangkan kerugian yang besar bagi daerah seperti hilangnya kepercayaan dari masyarakat, pemborosan yang luar biasa, lemahnya suatu administrasi dan kerugian lainnya.

2.1.2 Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP memiliki kekuatan hukum sebagai usaha untuk memperbaiki kualitas pelaporan keuangan dalam Pemerintah Indonesia.

SAP di Indonesia yang pertama diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dengan metode pencatatan basis kas menuju basis akrual. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dilakukan amandemen dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang memiliki dua lampiran yaitu lampiran pertama atas dasar basis akrual, sedangkan lampiran yang kedua menggunakan basis kas menuju akrual yang telah diterapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang ditujukan untuk entitas yang belum dapat menggunakan dasar akrual. Setelah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 diberlakukan, maka Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dinyatakan tidak diberlakukan kembali.

Berdasarkan SAP, laporan keuangan pemerintah terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran, laporan finansial dan catatan atas laporan keuangan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, setiap entitas diwajibkan melaporkan upaya dan hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antargenerasi, dan evaluasi kinerja.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa perubahan peraturan yang menjadi dasar SAP menyebabkan perubahan pada teknik akuntansi yang digunakan. Berdasarkan SAP yang baru, yaitu Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 entitas pelaporan wajib melaporkan segala upaya maupun hasil yang dicapai dalam kegiatan untuk memenuhi beberapa kepentingan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan. Laporan keuangan yang dihasilkan harus disajikan ke dalam beberapa komponen yang telah ditentukan oleh SAP yaitu laporan anggaran, laporan finansial, dan catatan atas laporan keuangan.

2.1.3 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Pergantian peraturan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyebabkan perubahan yang besar dan menyebabkan adanya pendekatan baru pada manajemen keuangan pemerintah. Perubahan yang terjadi pada teknik akuntansi yang digunakan melibatkan adanya perubahan dalam sistem akuntansi dan prosedur pencatatan, dokumen yang digunakan, dan fungsi otorisasi untuk sistem pengendalian internal, pelaporan dan pengawasan. Sumber daya manusia menjadi salah satu komponen yang penting dalam organisasi yang harus bisa beradaptasi dengan perubahan SAP ini dan meyakinkan bahwa manajemen sumber daya manusia dapat melakukan segala tugas sebaik mungkin untuk dapat berkontribusi secara optimal dalam pencapaian tujuan organisasional.

Menurut Widodo (2001), menyatakan bahwa perubahan memerlukan teknologi yang mendukung dan sumber daya manusia yang berkualitas, yaitu yang mampu melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang memadai. Menurut Indriasih (2014), menjelaskan bahwa sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha untuk merealisasikan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut.

Dalam suatu unit kerja khususnya di bagian keuangan pemerintah daerah, sumber daya manusia harus terqualifikasi yang didukung oleh latar belakang pendidikan yang sesuai, telah menempuh berbagai pelatihan dan pendidikan, dan memiliki pengalaman di bidang keuangan. Dalam pengimplementasi sistem akuntansi, kualitas sumber daya manusia dapat memahami logika akuntansi yang baik dan dapat menghasilkan laporan akuntansi yang baik pula. Menurut Hutapea (2008), terdapat tiga komponen utama terbentuknya kompetensi yaitu pengetahuan, keterampilan dan perilaku individu.

2.1.4 Penerapan Sistem Pengendalian Internal

Menurut COSO (2013), mendefinisikan pengendalian internal adalah proses yang dipengaruhi oleh dewan direktur entitas, manajer, dan anggota lainnya, yang didesain untuk menyediakan jaminan yang memadai yang berhubungan dengan pencapaian tujuan dengan beberapa kategori, yaitu:

1. Keefektifan dan keefisienan dari suatu operasi

2. Keandalan dari pelaporan keuangan
3. Kepatuhan pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di suatu organisasi.

Menurut indriasari (2008), menyatakan bahwa terdapat lima komponen dalam menjelaskan sistem pengendalian internal, yaitu:

1. Prosedur Operasi Standar (SOP)
2. Pemisahan kekuasaan
3. Dokumen dan pencatatan yang cukup
4. Tindakan pendisiplinan untuk pelanggaran
5. Pembatasan akses.

Adapun unsur-unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian internal.

1. Lingkungan Pengendalian

Pimpinan dalam instansi pemerintah diwajibkan untuk menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian internal dalam lingkungan kerjanya.

2. Penilaian risiko

Pimpinan dalam instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko yang terdiri dari identifikasi risiko dan analisis risiko. Dalam rangka penilaian

risiko, pimpinan instansi pemerintah menetapkan tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

3. Kegiatan Pengendalian

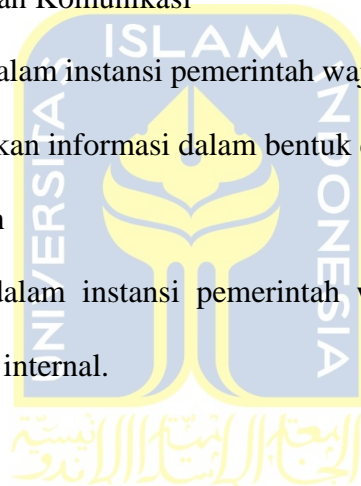
Pimpinan dalam instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan.

4. Informasi dan Komunikasi

Pimpinan dalam instansi pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat

5. Pemantauan

Pimpinan dalam instansi pemerintah wajib melakukan pemantauan sistem pengendalian internal.



2.1.5 Komitmen Organisasional

Berdasarkan Lubis (2014:54), menyatakan bahwa komitmen organisasi merupakan tingkat sejauh mana seorang karyawan memihak terhadap suatu organisasi tertentu beserta tujuan-tujuannya, serta berniat untuk tetap bertahan menjadi anggota dalam organisasi tersebut. Lubis (2014:55), menyatakan bahwa komitmen organisasi terbentuk ketika setiap individu mengembangkan tiga sikap yang saling terkait terhadap organisasi, yaitu:

1. Identifikasi, yaitu memahami atau mengapresiasi tujuan organisasi
2. Keterlibatan, perasaan untuk menjadi terlibat di dalam pekerjaan tersebut atau perasaan bahwa pekerjaan itu menyenangkan
3. Loyalitas, dimana perasaan bahwa organisasi itu adalah tempat untuk bekerja dan hidup.

Dari penjelasan diatas, bila dihubungkan dengan pemerintah maka pegawai instansi pemerintah yang memiliki komitmen yang tinggi akan berusaha memahami tujuan dari instansi dimana dia ditempatkan dan bekerja dengan sepenuh hati agar selaras dengan tujuan instansi tersebut. Anggota tersebut akan memiliki loyalitas yang tinggi dan berusaha untuk menghindari dari tindakan yang akan merugikan instansi di tempat dia bekerja. Berkebalikan bila pegawai tersebut tidak memiliki komitmen terhadap tempat dia bekerja, maka dia akan bekerja sesuai dengan keinginannya yang kemungkinan akan bertolak belakang dengan tujuan organisasi dan dapat berakibat merugikan organisasi.

2.1.6 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Perkembangan teknologi semakin lama semakin maju mengikuti perkembangan yang terjadi pada peradaban manusia. “Teknologi informasi meliputi komputer dan perangkat elektronik lainnya yang digunakan untuk menyimpan, mengambil, dan mentransmisikan dan memanipulasi data.” (Romney dan Steinbart, 2015 : 4). Selain dapat digunakan untuk mengolah data dan menyimpan informasi, teknologi informasi juga dapat digunakan sebagai teknologi komunikasi yaitu digunakan untuk penyebaran informasi. Komputer

sebagai salah satu komponen teknologi informasi dapat meringankan pekerjaan manusia bahkan membantu pekerjaan yang tidak dapat dilakukan manusia contohnya menyimpan informasi dalam jumlah yang banyak dalam satu waktu.

Jika pemrosesan data masih dilakukan secara manual, maka membutuhkan biaya yang tinggi untuk membayar pegawai dan kurang efektif dalam biaya pemrosesannya. Sebaliknya jika telah menggunakan mesin, meskipun diawal dalam pengadaannya membutuhkan biaya yang tinggi, namun untuk jangka waktu kedepannya dapat mengurangi biaya pemrosesan dan semua data dapat terproses secara otomatis. Jika teknologi informasi dikaitkan dengan sistem informasi akuntansi, maka dapat mengurangi penggunaan kertas karena data dikumpulkan dengan peralatan khusus dan tahapan-tahapan akuntansi dapat dilakukan secara otomatis. Laporan keuangan yang dihasilkan juga dalam bentuk yang lebih bervariasi, yaitu dalam bentuk kertas maupun *file*. Selain itu, hasil dapat didistribusikan kepada pihak lainnya yang terhubung melalui LAN.

Perkembangan teknologi informasi tidak hanya berguna dalam sektor bisnis, namun juga diperlukan dalam organisasi sektor publik. Berdasarkan PP Nomor 56 Tahun 2005 dijelaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik sebagai langkah menindaklanjuti proses pembagunan yang sesuai dengan prinsip *Good Governance*. Pemerintah perlu menyelenggarakan secara optimal pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi

manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintah bekerja secara terpadu dengan membuat akses antar unit kerja menjadi lebih sederhana.

2.1.7 Rekonsiliasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/ PMK.05/ 2013 menjelaskan bahwa rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/ subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama. Rekonsiliasi merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan. Dengan adanya rekonsiliasi, dapat meminimalisasi terjadinya perbedaan pencatatan yang berdampak pada validitas dan akurasi data yang tersaji dalam laporan keuangan.

2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Diantaranya sebagai berikut:

1. Suwanda (2015) meneliti tentang pengaruh implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kualitas sumber daya manusia, implementasi sistem pengendalian internal, komitmen organisasional, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah bagian Koordinasi dan Pengembangan wilayah IV Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa implementasi SAP, dan komitmen organisasional berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sebaliknya,

variabel kualitas sumber daya manusia, implementasi sistem pengendalian internal, dan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah bagian Koordinasi dan Pengembangan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat.

2. Pradono dan Basukianto (2015) meneliti tentang pengaruh kompetensi sumber daya manusia, teknologi informasi, peran Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD), rekonsiliasi, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia, teknologi informasi dan rekonsiliasi memberikan pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah. Sebaliknya, peran PPK-SKPD tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Handayani dan Surastiani (2015) meneliti tentang pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah Kota Salatiga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Sebaliknya, pemanfaatan teknologi

informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah Kota Salatiga.

4. Modo, Poputra dan Saerang (2016) meneliti tentang pengaruh pengawasan internal, pemahaman peraturan, kapasitas sumber daya manusia, penggunaan teknologi informasi, dan komitmen organisasi terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan internal, kapasitas sumber daya manusia, dan komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Sebaliknya, pemahaman tentang peraturan dan penggunaan teknologi informasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.
5. Dimiyati, Paramu, dan Trisnani (2017) meneliti tentang pengaruh sistem pengendalian intern terhadap keandalan laporan keuangan dengan mediasi penatausahaan aset tetap (studi empiris pada SKPD Pemerintah Kabupaten Bondowoso). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan positif terhadap keandalan laporan keuangan dan penatausahaan aset tetap. Penatausahaan aset tetap juga berpengaruh signifikan positif terhadap keandalan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bondowoso.
6. Alamsyah, Muslih dan Rahayu (2018) meneliti tentang kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah

(SAKD), pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan daerah (studi empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Depok). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

7. Astika dan Yasa (2018) meneliti tentang kemampuan komitmen organisasi memoderasi kompetensi pejabat penatausahaan keuangan dan sistem pengendalian internal pada kualitas laporan keuangan Kota Denpasar. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern terbukti mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Sebaliknya, komitmen organisasi tidak mempengaruhi kualitas laporan keuangan dan tidak berhasil memoderasi pengaruh kompetensi pejabat penatausahaan keuangan dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan.
8. Ningrum (2018) meneliti tentang pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kebumen. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Sebaiknya, sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kebumen.

9. Abidin, Afifudin, dan Junaidi (2018) meneliti tentang pengaruh implementasi Sistem Manajemen Daerah (SIMDA), kualitas sumber daya manusia, dan penerapan standar akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Malang. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengujian secara simultan secara bersama-sama variabel implementasi SIMDA, variabel kualitas SDM, dan standar akuntansi pemerintah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Malang. Dari pengujian secara parsial variabel SIMDA, kualitas SDM, dan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Malang.
10. Abdulhadi dan Erawati (2018) meneliti tentang pengaruh pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah, kapasitas sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah (studi kasus pada Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah dan kapasitas sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Sebaliknya, pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

2.3 Hipotesis Penelitian

2.3.1 Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP memiliki kekuatan hukum sebagai usaha untuk memperbaiki kualitas pelaporan keuangan dalam Pemerintah Indonesia.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menjadi salah satu komponen yang penting dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) karena menjadi dasar acuan penyusunan LKPD. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) diharuskan memahami dan mengimplementasikan SAP dalam penyusunan dan penyajian LKPD karena selain untuk memperbaiki kualitas LKPD, SAP juga memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu, bila SAP tidak diterapkan maka akan melanggar peraturan dan dapat dikenai sanksi karena akan menimbulkan kerugian. Kerugian yang diterima adalah opini dari Badan Pemeriksa Keuangan yang diperoleh tidak memuaskan juga dapat menimbulkan kerugian seperti penggelapan uang dan lainnya. Oleh karena itu, implementasi SAP sangat diperlukan dalam penyusunan dan penyajian LKPD agar kualitas LKPD yang dihasilkan baik.

Menurut penelitian Suwanda (2015) menyatakan bahwa implementasi SAP memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas LKPD. Hal ini

membuktikan bahwa semakin baik SAP yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian LKPD maka akan semakin baik kualitas LKPD yang dihasilkan.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H_{a1} : Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.3.2 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Adanya pergantian peraturan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyebabkan perubahan yang besar dan menyebabkan adanya pendekatan baru pada manajemen keuangan pemerintah. Menurut Widodo (2001), menyatakan bahwa perubahan memerlukan teknologi yang mendukung dan sumber daya manusia yang berkualitas, yaitu yang mampu melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang memadai.

Kompetensi sumber daya manusia menjadi faktor yang penting karena mempengaruhi kinerja dari pegawai tersebut. Jika kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki pegawai baik, dengan dimilikinya pengetahuan, keterampilan dan sikap yang baik maka pekerjaan akan menjadi lebih efisien dan efektif serta kualitas dari hasil pekerjaan yang dihasilkan menjadi lebih baik. Begitu juga dalam hal penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah (LKPD), semakin baik kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh PPK-SKPD, maka kualitas LKPD yang dihasilkan menjadi lebih baik.

Menurut penelitian Astika dan Yasa (2018) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Semakin baik kompetensi yang dimiliki PPK-SKPD maka akan semakin baik kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan.

Menurut penelitian Suwanda (2015) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi sumber daya manusia di sub-bagian akuntansi atau keuangan dalam hal jumlah maupun kualifikasi kurang mencukupi. Dalam hal kuantitas, hanya terdapat beberapa karyawan akuntansi dalam satu unit. Dalam hal kualifikasi, mayoritas sumber daya manusia di bagian akuntansi atau administrasi keuangan tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H_{a2} : Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2.3.3 Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut COSO (2013), mendefinisikan pengendalian internal adalah proses yang dipengaruhi oleh dewan direktur entitas, manajer, dan anggota lainnya, yang didesain untuk menyediakan jaminan yang memadai yang berhubungan dengan pencapaian tujuan dengan beberapa kategori, yaitu:

1. Keefektifan dan keefisienan dari suatu operasi
2. Keandalan dari pelaporan keuangan
3. Kepatuhan pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di suatu organisasi.

Sistem pengendalian internal merupakan faktor yang penting dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Sistem pengendalian internal memiliki peran yang penting dalam hal pengawasan kinerja PPK-SKPD agar dapat mencegah adanya kecurangan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.

Menurut penelitian Pradono dan Basukianto (2015) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Menurut penelitian Suwanda (2015) menyatakan bahwa implementasi sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini disebabkan tidak tercapainya perbaikan sistem pengendalian internal yaitu keandalan pelaporan. Tujuan dari pengendalian internal yang

efektif agar laporan keuangan dapat memenuhi tanggung jawab dalam pelaporan dan penyusunan serta penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H_{a3} : Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2.3.4 Pengaruh Komitmen Organisasional terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Lubis (2014:54), menyatakan bahwa komitmen organisasi merupakan tingkat sejauh mana seorang karyawan memihak terhadap suatu organisasi tertentu beserta tujuan-tujuannya, serta berniat untuk tetap bertahan menjadi anggota dalam organisasi tersebut. Semakin besar komitmen yang dimiliki oleh pegawai maka akan semakin besar motivasi pegawai tersebut untuk bekerja di dalam organisasi sehingga mendorong pegawai untuk memberikan kinerja yang semakin baik. Selain mendorong pegawai untuk memberikan kinerja yang baik, komitmen yang besar juga menghindarkan pegawai untuk melakukan perbuatan yang dapat melanggar peraturan yang akan mengakibatkan kerugian bagi organisasi. Begitu pula dalam pemerintah, semakin tinggi komitmen yang dimiliki PPK-SKPD maka akan semakin baik kinerja yang diberikan PPK yang diwujudkan dengan semakin baiknya kualitas LKPD yang dihasilkan. Komitmen yang tinggi juga menghindarkan PPK dari niat untuk

melakukan perbuatan yang dapat melanggar peraturan dan mengakibatkan kerugian bagi pemerintah.

Menurut penelitian Suwanda (2015) menyatakan bahwa komitmen organisasional berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tingginya komitmen organisasional yang dimiliki oleh PPK-SKPD maka mendorong PPK-SKPD untuk dapat bekerja selaras dengan tujuan yang ingin dicapai pemerintah salah satunya dengan cara menyusun dan menyajikan LKPD dengan kualitas yang semakin baik.

Menurut penelitian Astika dan Yasa (2018) menyatakan bahwa komitmen organisasional tidak mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini ditunjukkan dari hasil survei yang menyatakan bahwa mayoritas pegawai memiliki komitmen yang tinggi terhadap organisasi, namun demikian komitmen organisasional tidak cukup untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah dengan kualitas yang baik.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H_{a4} : Komitmen Organisasional berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2.3.5 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan PP Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan agar kemajuan teknologi informasi dapat dikembangkan dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan keuangan daerah, dan penyaluran Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik agar sesuai dengan prinsip *Good Governace*.

Menurut penelitian Alamsyah, Muslih dan Rahayu (2018) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Menurut penelitian Suwanda (2015) menyatakan hal sebaliknya bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini disebabkan karena penggunaan teknologi informasi yang belum optimal dan penggunaan teknologi informasi membutuhkan biaya yang besar. Beberapa sumber daya manusia di pemerintah daerah juga tidak terlalu menguasai teknologi informasi.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H_{a5} : Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2.3.6 Pengaruh Rekonsiliasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/ PMK.05/ 2013 menjelaskan bahwa rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/ subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama. Rekonsiliasi merupakan salah satu faktor penting untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Rekonsiliasi dibutuhkan untuk menghindari adanya perbedaan pencatatan yang berdampak pada validitas dan akurasi data yang tersaji dalam laporan keuangan. Jika terjadi perbedaan pencatatan, maka kevalidan data akan diragukan dan mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Laporan keuangan dengan data yang tidak valid dan akurat tersebut akan berdampak pada opini yang akan diterima dan mengakibatkan kerugian yang akan diterima oleh pemerintah daerah.

Menurut penelitian Pradono & Basukianto (2015) menyatakan bahwa rekonsiliasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Semakin baik intensitas rekonsiliasi maka semakin baik kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

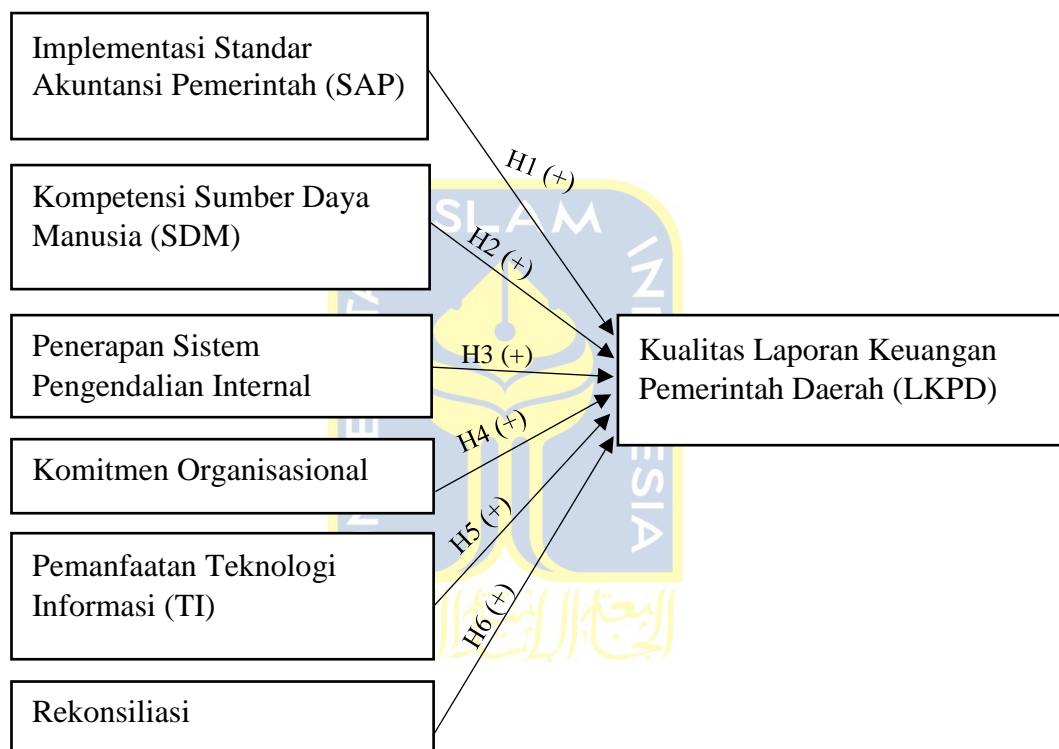
H_{a6} : Rekonsiliasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2.4 Kerangka Konseptual

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.1

Model Kerangka Pemikiran



Hubungan antara Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Penerapan Sistem Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Rekonsiliasi dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi yang digunakan dalam penelitian adalah beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari dinas, badan inspektorat, dan sekretariat.

Pengambilan sampel terhadap responden dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Responden dalam penelitian ini adalah pegawai yang berkerja dalam pengelolaan keuangan yang terdiri dari pejabat penatausahaan keuangan (PPK), bendahara, dan staff penatausahaan keuangan di beberapa OPD Kabupaten Sleman. Adapun kriteria dalam pengambilan sampel adalah pegawai yang bertugas di bagian akuntansi atau pengelolaan keuangan pada OPD Kabupaten Sleman

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menyebarkan kuesioner atau angket kepada setiap responden. Metode kuesioner ini digunakan untuk memperoleh informasi mengenai hubungan antara Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Internal, Komitmen Organisasional, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan

Rekonsiliasi, sehingga dari hasil yang diperoleh dapat dianalisis pengaruh dari variabel yang diteliti terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman.

Kuesioner atau angket merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan dalam pengumpulan data dengan cara memberikan beberapa pernyataan secara tertulis pada lembaran kertas kepada responden untuk dijawab secara jujur sesuai dengan pendapat responden tersebut. Jenis kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner tertutup, dimana responden hanya diperkenankan memilih jawaban yang telah disediakan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. Responden tidak diperkenankan untuk memberikan jawaban selain jawaban yang telah disediakan. Proses pengisian kuesioner oleh responden dilakukan secara langsung dengan memberikan tanda atas jawaban yang dipilih pada angket yang telah disediakan.

Pengukuran indikator dalam kuesioner pada setiap variabel menggunakan 4 poin skala likert yang digunakan untuk mengukur pendapat responden yang dipilih tentang kondisi riil yang tertuang dalam kuesioner, dengan perincian sebagai berikut:

Angka 1 : Sangat Tidak Setuju (STS)

Angka 2 : Tidak Setuju (TS)

Angka 3 : Setuju (S)

Angka 4 : Sangat Setuju (SS)

3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen adalah variabel terikat yang hasilnya dipengaruhi oleh variabel independen, sedangkan variabel independen adalah variabel bebas yang mempengaruhi variabel dependen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Internal, Komitmen Organisasional, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Rekonsiliasi.

3.3.1 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa karakteristik kualitas laporan keuangan merupakan ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga tujuan dapat dicapai. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dalam penelitian ini termasuk dalam variabel dependen. Menurut Ningrum (2018), keempat karakteristik kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami menjadi indikator yang akan dibuat pertanyaan dalam kuesioner.

Peneliti menggunakan sembilan item pertanyaan yang diadaptasi dari penelitian Ningrum (2018), yaitu: (1) untuk mengevaluasi kinerja di masa lalu dapat menggunakan informasi laporan keuangan; (2) laporan keuangan disajikan

secara tepat waktu; (3) informasi laporan keuangan yang dihasilkan dibuat secara lengkap; (4) transaksi dalam laporan keuangan digambarkan secara jujur; (5) informasi yang tersaji bebas dari kesalahan yang bersifat material dan kebenarannya telah teruji; (6) kebutuhan para pengguna telah terpenuhi dengan informasi yang disajikan; (7) informasi yang disajikan berpihak kepada kepentingan daerah; (8) informasi dalam laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya; (9) informasi dalam laporan keuangan jelas sehingga dapat dipahami oleh pengguna.

3.3.2 Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (X1)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Berdasarkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual, terdapat dua belas (12) Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) yang menjadi acuan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah dengan rincian sebagai berikut: PSAP 01 penyajian laporan keuangan; PSAP 02 laporan realisasi anggaran; PSAP 03 laporan arus kas; PSAP 04 catatan atas laporan keuangan; PSAP 05 akuntansi persediaan; PSAP 06 akuntansi investasi; PSAP 07 akuntansi aset tetap; PSAP 08 akuntansi konstruksi dalam pengerjaan; PSAP 09 akuntansi kewajiban; PSAP 10 koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan; PSAP 11 laporan keuangan konsolidasian; serta PSAP 12 laporan operasional.

Kedua belas PSAP ini yang nantinya akan menjadi indikator pertanyaan dalam kuesioner.

Peneliti menggunakan dua puluh (20) item pernyataan yang diadaptasi dari Kusumo (2018), yaitu: (1) Standar Akuntansi Pemerintah telah digunakan dalam penyusunan laporan keuangan; (2) aset dan kewajiban telah diakui menggunakan basis akrual; (3) pendapatan dan belanja telah diakui menggunakan basis kas; (4) asas bruto digunakan untuk mencatat pendapatan; (5) pengeluaran dari rekening kas telah diakui sebagai belanja; (6) penerimaan pembiayaan diakui saat diterima di rekening kas; (7) SAP telah digunakan dalam menyusun laporan arus kas yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, pendanaan, dan investasi; (8) untuk melakukan arus kas operasi digunakan metode langsung; (9) catatan atas laporan keuangan telah disajikan meliputi penjelasan pos-pos yang ada dalam laporan keuangan; (10) persediaan diakui pada saat diterima atau hak milik berpindah; (11) inventarisasi fisik digunakan dalam pencatatan persediaan; (12) kas yang dikeluarkan sebagai investasi diakui setelah memenuhi kriteria manfaat masa datang dapat diperoleh dan nilai investasi dapat diukur; (13) aset tetap telah diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam operasi entitas; (14) aset tetap telah dicatat sebesar biaya perolehan; (15) informasi konstruksi diungkapkan dalam pengerjaan pada akhir periode tertentu; (16) konstruksi dalam pengerjaan telah dipindahkan ke aset tetap jika pengerjaan konstruksi telah selesai; (17) telah mengakui kewajiban pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul dan dicatat sesuai dengan nilai nominal; (18) koreksi telah

dilakukan dimana koreksi merupakan tindakan pembetulan agar pos-pos yang tersaji sesuai dengan seharusnya; (19) laporan konsolidasian telah disajikan yang mencakup semua laporan keuangan dari semua entitas akuntansi; (20) laporan operasional telah disusun yang mencakup pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa pada periode akuntansi.

3.3.3 Kompetensi Sumber Daya Manusia (X₂)

Kualitas sumber daya manusia dapat didukung oleh kompetensi yang merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki suatu kemampuan khusus, keterampilan, pengetahuan dan memiliki suatu tanggung jawab. Oleh karena itu, indikator yang digunakan dalam penelitian adalah pengetahuan, keterampilan, dan perilaku.

Peneliti menggunakan enam item pernyataan yang diadaptasi dari Ningrum (2018), yaitu: (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual telah dipahami dengan baik; (2) pedoman mengenai prosedur dan proses akuntansi telah dipahami dengan baik; (3) jurnal dan posting jurnal ke dalam buku besar telah dilakukan dengan benar; (4) dapat menyusun dan menyajikan Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan dengan baik; (5) selalu mengedepankan etika dan kode etik sebagai akuntan saat bekerja; (6) selalu menolak setiap intervensi dari atasan yang dapat menimbulkan pelanggaran terhadap peraturan.

3.3.4 Penerapan Sistem Pengendalian Internal (X₃)

Adanya sistem pengendalian internal membuat pemerintah dapat menekan kemungkinan terjadinya kecurangan. Adapun unsur-unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian internal. Unsur-unsur tersebut yang akan digunakan sebagai indikator dalam penelitian ini.

Peneliti menggunakan sepuluh (10) item pernyataan yang diadaptasi dari penelitian Ningrum (2018), yaitu: (1) aturan terkait perilaku dan standar etika pegawai telah ditetapkan oleh pimpinan; (2) pembagian kewenangan dan tanggung jawab pegawai telah digambarkan oleh Struktur organisasi OPD; (3) pelanggaran kebijakan, prosedur, atau perilaku pegawai telah diambil tindakan secara tegas oleh pimpinan OPD; (4) analisis risiko secara lengkap dan menyeluruh terkait kemungkinan timbulnya pelanggaran terhadap sistem akuntansi telah dilakukan oleh pimpinan OPD; (5) Pimpinan selalu memiliki rencana pengelolaan atau mengurangi risiko pelanggaran terhadap sistem dan prosedur akuntansi; (6) Prosedur otorisasi dokumen transaksi yang baik dan ketepatan input dan/atau posting data berpengaruh pada kualitas informasi laporan keuangan yang dihasilkan; (7) Pegawai dan atasan telah memahami tujuan dari kegiatan pengendalian; (8) menyediakan informasi secara tepat waktu dan memungkinkan untuk melakukan tindakan korektif secara tepat; (9) telah melaksanakan saluran komunikasi berkelanjutan secara efektif dan terbuka

dengan masyarakat dan aparat pengawas internal dalam memberikan masukan signifikan; (10) temuan yang menunjukkan adanya kelemahan dan perlu perbaikan telah direviu dan dievaluasi oleh pimpinan.

3.3.5 Komitmen Organisasional (X₄)

Berdasarkan Lubis (2014:55), menjelaskan bahwa terdapat tiga komponen utama mengenai komitmen organisasi, yaitu komitmen afektif, komitmen normatif dan komitmen kontinu/berkelanjutan. Semakin tingginya komitmen yang dimiliki pegawai akan semakin baik kinerja yang diberikan pegawai tersebut. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah komitmen afektif, komitmen normatif dan komitmen kontinu/berkelanjutan.

Peneliti menggunakan lima item pernyataan yang diadaptasi dari penelitian Siahaan (2017), yaitu: (1) telah menjadi bagian dari organisasi itu; (2) masalah yang terjadi di instansi menjadi permasalahan saya juga; (3) telah bekerja melaksanakan program sesuai dengan visi dan misi instansi; (4) berada di instansi tempat saya bekerja merupakan kesempatan terbaik membangun karir; (5) berusaha meningkatkan prestasi dan menunjukkan sikap positif di instansi tempat saya bekerja.

3.3.6 Pemanfaatan Teknologi Informasi (X₅)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah dijelaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan

teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik sebagai langkah dalam menindaklanjuti proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip *Good Governance*. Oleh karena itu, komputer dan jaringan internet digunakan sebagai indikator penelitian.

Peneliti menggunakan lima item pernyataan yang diadaptasi dari penelitian Ningrum (2018), yaitu: (1) Proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan dilakukan secara komputerisasi; (2) Pengelolaan data transaksi keuangan menggunakan *software* yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (3) Terdapat sistem keamanan komputer (antivirus) dan menerapkan penjadwalan pemeliharaan komputer secara teratur; (4) Jaringan internet selalu dalam kondisi yang baik/lancar untuk digunakan; (5) jaringan internet telah dimanfaatkan di unit sebagai penghubung dalam pengiriman informasi yang dibutuhkan.

3.3.7 Rekonsiliasi (X₆)

Rekonsiliasi merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan. Dengan adanya rekonsiliasi, dapat meminimalisasi terjadinya perbedaan pencatatan yang berdampak pada validitas dan akurasi data yang tersaji dalam laporan keuangan. Pemahaman mengenai rekonsiliasi dan ketertiban dalam pelaksanaan rekonsiliasi digunakan sebagai indikator penelitian.

Peneliti menggunakan lima pernyataan yang diadaptasi dari penelitian Tambunan (2012), yaitu: (1) Pelaksanaan rekonsiliasi internal dilakukan setiap bulan; (2) Rekonsiliasi internal meningkatkan akurasi laporan keuangan pada unit akuntansi keuangan (Sistem Akuntansi Keuangan/SAK) dan unit akuntansi barang (Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara/ SIMAK BMN); (3) Pelaksanaan rekonsiliasi dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk menyamakan data pengeluaran satuan kerja dengan data pengeluaran KPPN; (4) Rekonsiliasi data dengan KPPN menghasilkan data akuntansi yang akurat dan terpercaya, yang berguna dalam menghasilkan laporan keuangan yang kredibel dan terpercaya; (5) Rekonsiliasi yang tepat dan akurat dapat mempertahankan opini BPK, Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*) tanpa paragraf penjelasan.

3.4 Hipotesis Operasional

1. Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

$H_{a1}; \beta_1 > 0$: Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

$H_{o1}; \beta_1 \leq 0$: Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah tidak berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

$H_{a2}; \beta_2 > 0$: Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

$H_{02}; \beta_2 \leq 0$: Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

3. Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

$H_{a3}; \beta_3 > 0$: Penerapan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

$H_{03}; \beta_3 \leq 0$: Penerapan Sistem Pengendalian Internal tidak berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

4. Pengaruh Komitmen Organisasional terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

$H_{a4}; \beta_4 > 0$: Komitmen Organisasional berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

$H_{04}; \beta_4 \leq 0$: Komitmen Organisasional tidak berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

5. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

$H_{a5}; \beta_5 > 0$: Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

$H_{o5}; \beta_5 \leq 0$: Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

6. Pengaruh Rekonsiliasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

$H_{a6}; \beta_6 > 0$: Rekonsiliasi berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

$H_{o6}; \beta_6 \leq 0$: Rekonsiliasi tidak berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

3.5 Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif. Dalam penelitian ini data dianalisis menggunakan program SPSS 23.0 *for windows*. Jawaban dari pertanyaan dalam setiap variabel akan diukur menggunakan skala likert yang diberi skor 1-4. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel atau lebih dan menganalisis pengaruh dari beberapa variabel independen (X) terhadap satu variabel dependen (Y) secara bersamaan (Ghozali, 2013). Model

regresi linier berganda dalam penelitian ini menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1\text{SAP} + \beta_2\text{SDM} + \beta_3\text{SPI} + \beta_4\text{KO} + \beta_5\text{TI} + \beta_6\text{RK} + \varepsilon$$

Keterangan :

Y	= Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
α	= Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5, \beta_6$	= Koefisien regresi
SAP	= Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah
SDM	= Kompetensi Sumber Daya Manusia
SPI	= Penerapan Sistem Pengendalian Internal
KO	= Komitmen Organisasional
TI	= Pemanfaatan Teknologi Informasi
RK	= Rekonsiliasi
ε	= <i>Error</i>

3.5.1 Uji Kualitas Data

3.5.1.1 Uji Reliabilitas

Reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dapat dikatakan reliabel atau andal apabila jawaban dari seseorang atau responden terhadap pertanyaan yang diberikan dapat konsisten dan stabil sesuai dengan pendapat dan keyakinan dari responden itu sendiri. Uji yang digunakan untuk mengukur reliabilitas adalah uji statistik *Cronbach Alpha* (α). Suatu kuesioner dapat dikatakan reliabel atau andal jika *cronbach's alpha* $\geq 0,6$ (Ghozali, 2013).

3.5.1.2 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur tingkat kevalidan suatu kuesioner. Uji validitas ini digunakan untuk menghitung korelasi masing-masing indikator dari satu variabel dengan total variabel yang digunakan dalam penelitian (Ghozali, 2016). Uji yang digunakan untuk mengukur validitas adalah uji statistik *Pearson Correlation*. Validitas suatu butir kuesioner dapat diketahui jika nilai *correlation sig. (2-tailed)* $< 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut valid dan layak untuk mengikuti proses analisis selanjutnya. Selain menggunakan nilai *sig.(2-tailed)*, juga menggunakan hasil korelasi antara setiap skor dengan skor total dan dibandingkan dengan nilai kritis (*r* tabel). Jika hasil korelasi setiap skor lebih besar dari *r* tabel maka kuesioner tersebut dinyatakan valid.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan dalam penelitian untuk memastikan bahwa data yang diuji berdistribusi normal dan tidak terdapat adanya multikolinieritas dan heteroskedastisitas.

3.5.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui kenormalan distribusi data dari variabel dependen dan variabel independen dalam model regresi. Data residual bersifat normal jika probabilitas lebih besar dari 5% (α) (Ghozali, 2011).

Uji normalitas digunakan dengan uji statistik *one-sample Kolmogorov-Smirnov*. Pengambilan kesimpulan hasil dari pengujian ini adalah :

- a. Jika hasil *one-sample Kolmogorov-Smirnov* di atas tingkat signifikansi 0,05 menyatakan bahwa pola distribusi normal dan model regresi tersebut memenuhi asumsi normalitas, dan
- b. Jika hasil *one-sample Kolmogorov-Smirnov* di bawah tingkat signifikansi 0,05 menyatakan bahwa pola distribusi tidak normal dan model regresi tersebut tidak memenuhi asumsi normalitas.

3.5.2.2 Uji Multikolinieritas

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Jika variabel saling berkorelasi, maka variabel independen tersebut tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen satu dengan variabel independen yang lain memiliki nilai korelasi sama dengan nol.

Untuk mengetahui keberadaan multikolinieritas pada model regresi dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan VIF (*Variance Inflation Factor*).

- a. Tidak terdapat multikolinieritas bila nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil 10
- b. Terdapat multikolinieritas bila nilai *tolerance* lebih kecil dari 0,10 dan nilai VIF lebih besar dari 10

3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas merupakan uji untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas dengan menggunakan asumsi bahwa varian dalam variabel gangguan adalah konstan. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika terdapat perbedaan maka disebut heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas akan ditunjukkan oleh koefisien dari setiap variabel independen terhadap nilai absolut residunya (e). Jika $p < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa data mengandung heteroskedastisitas. Untuk menguji keberadaan heteroskedastisitas yaitu dengan uji glejster dengan melihat probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan yaitu 5% atau 0,05.

3.5.3 Analisis Regresi

3.5.3.1 Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Tingkat kemampuan model dalam menjelaskan variasi dari variabel dependen dapat diukur menggunakan koefisien determinasi (R^2). Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 hingga 1. Kemampuan variabel-variabel independen (X) dalam menjelaskan variabel dependen (Y) sangat kecil atau terbatas bila nilai R^2 kecil, sedangkan kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen dinilai besar bila nilai R^2 besar (Ghozali, 2013).

3.5.3.2 Uji F

Menurut Ghozali (2011) menjelaskan bahwa uji kelayakan model atau uji F digunakan untuk mengetahui kelayakan model regresi linier berganda sebagai alat analisis. Keputusan diambil menggunakan kriteria, sebagai berikut:

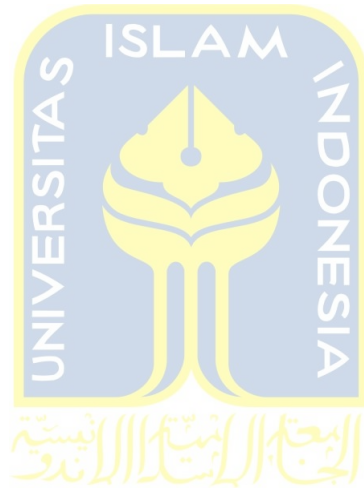
- a. Model regresi memiliki tingkat kesesuaian model yang baik bila nilai F signifikan lebih kecil dari 0,05 (taraf signifikansi).
- b. Model regresi memiliki tingkat kesesuaian model yang tidak baik bila nilai F signifikan lebih besar dari 0,05 (taraf signifikansi).

3.5.3.3 Uji T

Untuk menguji signifikansi hubungan antara variabel independen (X) dan variabel dependen (Y) dapat menggunakan uji t. Terdapat dua kriteria dalam pengambilan keputusan apakah H_0 didukung atau tidak didukung yaitu dengan nilai signifikansi $t < 0,05$ dan tanda koefisien regresi yang sesuai dengan prediksi.

Ghozali (2011) menjelaskan bahwa dasar pengambilan keputusan menggunakan angka probabilitas signifikansi, yaitu jika angka probabilitas signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka H_{a1} (Implementasi SAP berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah), H_{a2} (Kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap Kualitas laporan Keuangan Pemerintah Daerah), H_{a3} (Penerapan SPI berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah), H_{a4} (Komitmen Organisasional berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah), H_{a5}

(Pemanfaatan TI berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah), dan H_{a6} (Rekonsiliasi berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) diterima. Namun sebaliknya, jika angka probabilitas signifikansi lebih besar dari 0,05 maka $H_{a1,2,3,4,5,6}$ ditolak.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Responden

4.1.1 Deskripsi Objek

Analisis data yang dilakukan menggunakan metode deskriptif dan metode kuantitatif. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan penilaian responden terhadap beberapa variabel yang digunakan dalam penelitian. Metode kuantitatif dilakukan dengan menggunakan *software* SPSS 23.0. Kuesioner didistribusikan kepada beberapa Operasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman sebanyak 143 buah. Dari seluruh kuesioner yang telah dibagikan, terdapat 127 kuesioner yang kembali dan dapat diuji. Pendistribusian kuesioner dilakukan dengan diawali memohon perizinan penelitian kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman dengan menyerahkan proposal penelitian, surat permohonan perizinan dari kampus dan kuesioner yang telah dibuat oleh peneliti. Surat perizinan diproses selama satu hari kerja. Surat izin penelitian yang dikeluarkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik digunakan sebagai pengantar kuesioner yang disebar oleh peneliti ke setiap OPD Kabupaten Sleman. Proses perizinan, penyebaran kuesioner hingga penarikan kuesioner dilakukan pada tanggal 1 Februari – 22 Februari 2019. Rangkuman pendistribusian dan penarikan kembali kuesioner penelitian digambarkan dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1**Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner**

Keterangan	Jumlah	Persentase
Kuesioner yang didistribusikan	143	100%
Kuesioner yang kembali	127	88,8%
Kuesioner yang tidak kembali	16	11,2%
Kuesioner yang dapat diolah	127	88,8%
Kuesioner yang tidak dapat diolah	0	0

Sumber: data primer, diolah 2019

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa kuesioner yang kembali memiliki tingkat respon sebesar 88,8% dengan hasil data yang dapat digunakan dan diolah sebesar 88,8% dari kuesioner yang disebar seluruhnya.

Tabel 4.2**Daftar Distribusi Kuesioner**

No	Unit Kerja	Jumlah yang didistribusi	Jumlah yang kembali	Jumlah yang dapat diolah
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5	4	4
2	Dinas Tenaga Kerja	5	4	4
3	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	5	5	5
4	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	5	5	5
5	Dinas Sosial	5	5	5

No	Unit Kerja	Jumlah yang didistribusi	Jumlah yang kembali	Jumlah yang dapat diolah
6	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	5	5	5
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5	5	5
8	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5	5	5
9	Dinas Kebudayaan	5	5	5
10	Inspektorat	5	5	5
11	Dinas Pariwisata	4	3	3
12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5	4	4
13	Badan Keuangan dan Aset Daerah	5	5	5
14	Dinas Pendidikan	5	4	4
15	Dinas Kesehatan	5	4	4
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5	4	4
17	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Pemukiman	5	4	4
18	Dinas Perhubungan	5	5	5
19	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	5	5	5
20	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	5	4	4

No	Unit Kerja	Jumlah yang didistribusi	Jumlah yang kembali	Jumlah yang dapat diolah
21	Dinas Lingkungan Hidup	5	4	4
22	Badan Narkotika Nasional	5	4	4
23	Dinas Komunikasi dan Informatika	5	5	5
24	Dinas Pemuda dan Olahraga	5	5	5
25	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu	5	4	4
26	Sekretariat DPRD	5	4	4
27	Badan Perencanaan dan Pembangunan	5	4	4
28	Sekretariat Daerah	4	3	3
29	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	5	4	4
Total		143	127	127

Sumber: Data Primer, diolah 2019

4.1.2 Deskripsi Responden

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari hasil penelitian, dapat digambarkan mengenai karakteristik responden yang dapat dilihat melalui tabel karakteristik responden. Gambaran umum tentang karakteristik pegawai pemerintah daerah yang bekerja dalam beberapa OPD khususnya dibagian keuangan dapat diketahui dari tabel karakteristik responden. Karakteristik responden dapat dilihat pada tabel 4.3.

Tabel 4.3
Karakteristik Responden

Data Deskriptif	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
Jenis Kelamin	Laki-Laki	44	34,6%
	Perempuan	83	65,4%
Umur	< 20 tahun	2	1,6%
	20 – 35 tahun	33	26%
	36 - 50 tahun	70	55,1%
	>50 tahun	22	17,3%
Pendidikan	D3	16	12,6%
	S1	77	60,6%
	S2	13	10,2%
	Lainnya	21	16,5%
Jurusan	Akuntansi	39	30,7%
	Manajemen	37	29,1%
	Pertanian	1	0,8%
	Lainnya	50	39,4%
Lama Bekerja	1 – 5 tahun	24	18,9%
	6-10 tahun	43	33,9%
	>10 tahun	60	47,2%

Sumber: Data primer, diolah 2019

4.1.3 Deskripsi Data Penelitian

Untuk mendeskripsikan mengenai data penelitian, digunakan analisis deskriptif untuk melihat distribusi data yang akan diolah dalam penelitian serta memberikan gambaran mengenai nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), dan standar deviasi.

Tabel 4.4**Hasil Pengujian Statistik Deskriptif**

Descriptive Statistics						
	N	Minimum	Maximum	Mean		Std. Deviation
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic
SAP	127	1,85	4,00	3,1417	,02577	,29044
SDM	127	1,50	4,00	3,0692	,03522	,39691
SPI	127	1,70	4,00	3,1480	,03116	,35115
KO	127	1,60	4,00	3,1417	,03067	,34559
TI	127	1,40	4,00	3,2173	,03571	,40239
RK	127	1,40	4,00	3,1260	,03839	,43264
KLK	127	1,56	4,00	3,1609	,03216	,36243
Valid N (listwise)	127					

Sumber: Data Primer, diolah 2019

Berdasarkan hasil pengujian deskriptif pada tabel 4.4, dapat dilihat bahwa hasil variabel implementasi standar akuntansi pemerintah (SAP) menunjukkan nilai minimum sebesar 1,85 yang berarti bahwa dari beberapa pernyataan yang terdapat dalam variabel SAP, responden banyak memilih jawaban tidak setuju atau sangat tidak setuju yang jika diartikan dalam skala likert menunjukkan angka 1 dan 2. Variabel SAP memiliki nilai minimum 1 pada pernyataan ke 6, 7, 12 dan 16. Untuk nilai maksimum, variabel SAP memiliki nilai 4 yang artinya responden memilih jawaban sangat setuju pada pernyataan yang terdapat pada variabel SAP. Variabel SAP memiliki rata-rata sebesar 3,1417 yang menggambarkan jawaban responden akan pengimplementasian SAP sebesar 3,1417. Variabel SAP memiliki standar deviasi sebesar 0,29044 yang berarti bahwa tingkat penyebaran data variabel SAP sebesar 0,29044.

Berdasarkan hasil pengujian deskriptif pada tabel 4.4, dapat dilihat bahwa hasil variabel kompetensi sumber daya manusia (SDM) menunjukkan nilai minimum sebesar 1,50 yang berarti bahwa dari beberapa pernyataan yang terdapat dalam variabel SDM, responden banyak memilih jawaban tidak setuju atau sangat tidak setuju yang jika diartikan dalam skala likert menunjukkan angka 1 dan 2. Variabel SDM memiliki nilai minimum 1 pada pernyataan ke 2, 5, dan 6. Untuk nilai maksimum, variabel SDM memiliki nilai 4 yang artinya responden memilih jawaban sangat setuju pada pernyataan yang terdapat pada variabel SDM. Variabel SDM memiliki rata-rata sebesar 3,0692 yang menggambarkan jawaban responden akan kompetensi sumber daya manusia sebesar 3,0692. Variabel SDM memiliki standar deviasi sebesar 0,39691 yang berarti bahwa tingkat penyebaran data variabel SDM sebesar 0,39691.

Berdasarkan hasil pengujian deskriptif pada tabel 4.4, dapat dilihat bahwa hasil variabel penerapan sistem pengendalian internal (SPI) menunjukkan nilai minimum sebesar 1,70 yang berarti bahwa dari beberapa pernyataan yang terdapat dalam variabel SPI, responden banyak memilih jawaban tidak setuju atau sangat tidak setuju yang jika diartikan dalam skala likert menunjukkan angka 1 dan 2. Variabel SPI memiliki nilai minimum 1 pada pernyataan ke 5, 6, dan 9. Untuk nilai maksimum, variabel SPI memiliki nilai 4 yang artinya responden memilih jawaban sangat setuju pada pernyataan yang terdapat pada variabel SPI. Variabel SPI memiliki rata-rata sebesar 3,1480 yang menggambarkan jawaban responden akan penerapan SPI sebesar 3,1480.

Variabel SPI memiliki standar deviasi sebesar 0,35115 yang berarti bahwa tingkat penyebaran data variabel SPI sebesar 0,35115.

Berdasarkan hasil pengujian deskriptif pada tabel 4.4, dapat dilihat bahwa hasil variabel komitmen organisasional (KO) menunjukkan nilai minimum sebesar 1,60 yang berarti bahwa dari beberapa pernyataan yang terdapat dalam variabel KO, responden banyak memilih jawaban tidak setuju atau sangat tidak setuju yang jika diartikan dalam skala likert menunjukkan angka 1 dan 2. Variabel KO memiliki nilai minimum 1 pada pernyataan ke 4 dan 5. Untuk nilai maksimum, variabel KO memiliki nilai 4 yang artinya responden memilih jawaban sangat setuju pada pernyataan yang terdapat pada variabel KO. Variabel KO memiliki rata-rata sebesar 3,1417 yang menggambarkan jawaban responden akan komitmen organisasional pegawai terhadap instansi tersebut sebesar 3,1417. Variabel KO memiliki standar deviasi sebesar 0,34559 yang berarti bahwa tingkat penyebaran data variabel KO sebesar 0,34559.

Berdasarkan hasil pengujian deskriptif pada tabel 4.4, dapat dilihat bahwa hasil variabel pemanfaatan teknologi informasi (TI) menunjukkan nilai minimum sebesar 1,40 yang berarti bahwa dari beberapa pernyataan yang terdapat dalam variabel TI, responden banyak memilih jawaban tidak setuju atau sangat tidak setuju yang jika diartikan dalam skala likert menunjukkan angka 1 dan 2. Variabel TI memiliki nilai minimum 1 pada pernyataan ke 1, 2, 4 dan 5. Untuk nilai maksimum, variabel TI memiliki nilai 4 yang artinya responden memilih jawaban sangat setuju pada pernyataan yang terdapat pada variabel TI. Variabel TI memiliki rata-rata sebesar 3,2173 yang menggambarkan jawaban

responden akan pemanfaatan teknologi informasi di instansi tersebut sebesar 3,2173. Variabel TI memiliki standar deviasi sebesar 0,40239 yang berarti bahwa tingkat penyebaran data variabel TI sebesar 0,40239.

Berdasarkan hasil pengujian deskriptif pada tabel 4.4, dapat dilihat bahwa hasil variabel rekonsiliasi (RK) menunjukkan nilai minimum sebesar 1,40 yang berarti bahwa dari beberapa pernyataan yang terdapat dalam variabel RK, responden banyak memilih jawaban tidak setuju atau sangat tidak setuju yang jika diartikan dalam skala likert menunjukkan angka 1 dan 2. Variabel RK memiliki nilai minimum 1 pada pernyataan ke 2, 3, dan 4. Untuk nilai maksimum, variabel RK memiliki nilai 4 yang artinya responden memilih jawaban sangat setuju pada pernyataan yang terdapat pada variabel RK. Variabel RK memiliki rata-rata sebesar 3,1260 yang menggambarkan jawaban responden akan pengimplementasian rekonsiliasi sebesar 3,1260. Variabel RK memiliki standar deviasi sebesar 0,43264 yang berarti bahwa tingkat penyebaran data variabel RK sebesar 0,43264.

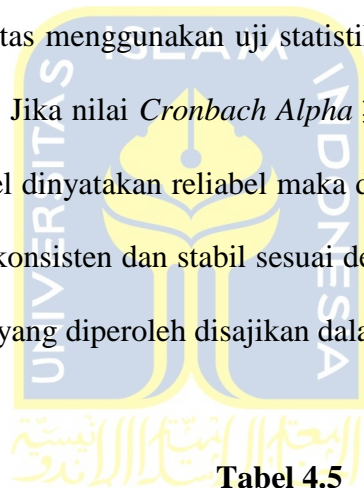
Berdasarkan hasil pengujian deskriptif pada tabel 4.4, dapat dilihat bahwa hasil variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (KLK) menunjukkan nilai minimum sebesar 1,56 yang berarti bahwa dari beberapa pernyataan yang terdapat dalam variabel KLK, responden banyak memilih jawaban tidak setuju atau sangat tidak setuju yang jika diartikan dalam skala likert menunjukkan angka 1 dan 2. Variabel KLK memiliki nilai minimum 1 pada pernyataan ke 4, 7, 8 dan 9. Untuk nilai maksimum, variabel KLK memiliki nilai 4 yang artinya responden memilih jawaban sangat setuju pada pernyataan

yang terdapat pada variabel KKK. Variabel KKK memiliki rata-rata sebesar 3,1609 yang menggambarkan jawaban responden akan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 3,1609. Variabel KKK memiliki standar deviasi sebesar 0,36243 yang berarti bahwa tingkat penyebaran data variabel KKK sebesar 0,36243.

4.2 Uji Kualitas Data

4.2.1 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas menggunakan uji statistik *Cronbach Alpha* (α) dengan *software* SPSS 23.0. Jika nilai *Cronbach Alpha* $\geq 0,6$ maka variabel dikatakan reliabel. Jika variabel dinyatakan reliabel maka dapat disimpulkan bahwa hasil jawaban responden konsisten dan stabil sesuai dengan pendapat riil responden. Hasil uji reliabilitas yang diperoleh disajikan dalam tabel 4.5.



Tabel 4.5

Uji Reliabilitas

Variabel	Jumlah Item	<i>Cronbach Alpha</i> (α)	Keterangan
Kualitas Laporan Keuangan	9	0,924	Reliabel
Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah	20	0,918	Reliabel
Kompetensi Sumber Daya Manusia	6	0,882	Reliabel
Sistem Pengendalian Internal	10	0,931	Reliabel
Komitmen Organisasi	5	0,849	Reliabel

Variabel	Jumlah Item	<i>Cronbach Alpha</i> (α)	Keterangan
Pemanfaatan Teknologi Informasi	5	0,854	Reliabel
Rekonsiliasi	5	0,864	Reliabel

Sumber: Data primer, diolah 2019

Berdasarkan uji reliabilitas diatas, tiap variabel menunjukkan nilai *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,6. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap pernyataan yang terkandung dalam kuesioner memiliki tingkat reliabilitas yang baik dan layak untuk dijadikan sebagai instrumen penelitian.

4.2.2 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur keakuratan dari hasil penelitian dan menentukan apakah informasi yang dihasilkan dapat digunakan dalam penelitian atau tidak dapat digunakan dalam penelitian. Uji validitas dilakukan dengan membandingkan hasil *Sig. (2-tailed)* yang dihasilkan dengan tarif signifikansi yaitu 5% atau 0,05. Validitas suatu butir kuesioner dapat diketahui jika nilai *correlation sig. (2-tailed)* $< 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut valid dan layak untuk mengikuti proses analisis selanjutnya. Uji validitas juga dapat dilakukan dengan membandingkan nilai *r* statistik dengan *r* tabel dengan terlebih dahulu mencari *degree of freedom* (dF). *Degree of freedom* (dF) didapatkan dengan rumus $N-2$, dimana *N* merupakan jumlah sampel. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah $N = 127$, sehingga $dF = 127-2$ yaitu 125. *R* tabel yang digunakan dengan tingkat signifikansi sebesar 5% adalah 0,1743. Rincian hasil dari uji validitas dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.6**Uji Validitas Variabel Kualitas Laporan Keuangan**

Item	Sig. (2-tailed)	r statistik	Keterangan
Pernyataan 1	0,000	0,813	Valid
Pernyataan 2	0,000	0,776	Valid
Pernyataan 3	0,000	0,824	Valid
Pernyataan 4	0,000	0,773	Valid
Pernyataan 5	0,000	0,804	Valid
Pernyataan 6	0,000	0,838	Valid
Pernyataan 7	0,000	0,746	Valid
Pernyataan 8	0,000	0,769	Valid
Pernyataan 9	0,000	0,802	Valid

Sumber: Data primer, diolah 2019

Tabel 4.7**Uji Validitas Variabel Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah**

Item	Sig. (2-tailed)	r Statistik	Keterangan
Pernyataan 1	0,000	0,601	Valid
Pernyataan 2	0,000	0,684	Valid
Pernyataan 3	0,000	0,600	Valid
Pernyataan 4	0,000	0,505	Valid
Pernyataan 5	0,000	0,731	Valid
Pernyataan 6	0,000	0,601	Valid
Pernyataan 7	0,000	0,620	Valid
Pernyataan 8	0,000	0,655	Valid

Item	Sig. (2-tailed)	r Statistik	Keterangan
Pernyataan 9	0,000	0,673	Valid
Pernyataan 10	0,000	0,674	Valid
Pernyataan 11	0,000	0,584	Valid
Pernyataan 12	0,000	0,527	Valid
Pernyataan 13	0,000	0,637	Valid
Pernyataan 14	0,000	0,608	Valid
Pernyataan 15	0,000	0,691	Valid
Pernyataan 16	0,000	0,662	Valid
Pernyataan 17	0,000	0,547	Valid
Pernyataan 18	0,000	0,692	Valid
Pernyataan 19	0,000	0,691	Valid
Pernyataan 20	0,000	0,608	Valid

Sumber: Data primer, diolah 2019

Tabel 4.8

Uji Validitas Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia

Item	Sig. (2-tailed)	r Statistik	Keterangan
Pernyataan 1	0,000	0,766	Valid
Pernyataan 2	0,000	0,842	Valid
Pernyataan 3	0,000	0,840	Valid
Pernyataan 4	0,000	0,839	Valid
Pernyataan 5	0,000	0,773	Valid
Pernyataan 6	0,000	0,690	Valid

Sumber: Data primer, diolah 2019

Tabel 4.9**Uji Validitas Variabel Penerapan Sistem Pengendalian Internal**

Item	Sig. (2-tailed)	r Statistik	Keterangan
Pernyataan 1	0,000	0,785	Valid
Pernyataan 2	0,000	0,804	Valid
Pernyataan 3	0,000	0,783	Valid
Pernyataan 4	0,000	0,781	Valid
Pernyataan 5	0,000	0,770	Valid
Pernyataan 6	0,000	0,764	Valid
Pernyataan 7	0,000	0,783	Valid
Pernyataan 8	0,000	0,835	Valid
Pernyataan 9	0,000	0,788	Valid
Pernyataan 10	0,000	0,784	Valid

Sumber: Data primer, diolah 2019

Tabel 4.10**Uji Validitas Variabel Komitmen Organisasional**

Item	Sig. (2-tailed)	r Statistik	Keterangan
Pernyataan 1	0,000	0,794	Valid
Pernyataan 2	0,000	0,848	Valid
Pernyataan 3	0,000	0,770	Valid
Pernyataan 4	0,000	0,770	Valid
Pernyataan 5	0,000	0,771	Valid

Sumber: Data primer, diolah 2019

Tabel 4.11**Uji Validitas Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Item	<i>Sig.</i> (2-tailed)	r Statistik	Keterangan
Pernyataan 1	0,000	0,832	Valid
Pernyataan 2	0,000	0,864	Valid
Pernyataan 3	0,000	0,783	Valid
Pernyataan 4	0,000	0,768	Valid
Pernyataan 5	0,000	0,727	Valid

Sumber: Data primer, diolah 2019

Tabel 4.12**Uji Validitas Variabel Rekonsiliasi**

Item	<i>Sig.</i> (2-tailed)	r Statistik	Keterangan
Pernyataan 1	0,000	0,801	Valid
Pernyataan 2	0,000	0,843	Valid
Pernyataan 3	0,000	0,878	Valid
Pernyataan 4	0,000	0,845	Valid
Pernyataan 5	0,000	0,642	Valid

Sumber: Data primer, diolah 2019

Berdasarkan hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan yang terdapat dalam variabel kualitas laporan keuangan, implementasi standar akuntansi pemerintah, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, komitmen organisasional, pemanfaatan teknologi informasi, dan rekonsiliasi adalah valid karena nilai *Sig.*(2-tailed) seluruh item

pernyataan $< 0,05$ (α) dan nilai r statistik dari seluruh item pernyataan lebih besar daripada 0,1743 (r tabel). Dari hasil uji validitas tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan yang terdapat dalam kuesioner dapat digunakan sebagai alat pengumpul data yang akurat dalam penelitian.

4.3 Uji Asumsi Klasik

4.3.1 Uji Normalitas

Untuk mengetahui kenormalan dari distribusi data dalam model regresi dapat menggunakan uji normalitas. Uji normalitas menggunakan uji statistik *one-sample Kolmogorov-Smirnov*. Hasil pengujian ditunjukkan dalam tabel 4.13.



Tabel 4.13

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		127
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-,0180929
	Std. Deviation	,18276546
Most Extreme Differences	Absolute	,104
	Positive	,104
	Negative	-,094
Kolmogorov-Smirnov Z		1,175
Asymp. Sig. (2-tailed)		,126

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data primer, diolah 2019

Berdasarkan hasil uji normalitas yang ditunjukkan pada tabel 4.13 menunjukkan hasil *Asymp. Sig. (2-tailed)* adalah sebesar 0,126 yang berarti

bahwa data dalam model regresi ini bersifat normal karena hasil *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih besar daripada 0,05 (α).

4.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah ditemukan korelasi antara variabel independen dalam model regresi. Jika nilai tolerance lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10 maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen. Hasil uji multikolinearitas dalam penelitian ini ditunjukkan dalam tabel 4.14.

Tabel 4.14
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel Independen	<i>Collinearity Statistics</i>	
	<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
SAP	0,317	3,159
SDM	0,427	2,342
SPI	0,338	2,961
KO	0,352	2,842
TI	0,359	2,783
RK	0,460	2,176

Sumber: Data primer, diolah 2019

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas yang ditunjukkan pada tabel 4.14 diketahui bahwa nilai *tolerance* pada seluruh variabel independen lebih besar dari 0,1 dan nilai *VIF* seluruh variabel independen lebih kecil dari 10. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antarvariabel independen.

4.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mendeteksi apakah varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap atau terdapat perbedaan dengan menggunakan asumsi bahwa varian dalam variabel gangguan adalah konstan. Untuk menguji keberadaan heteroskedastisitas yaitu dengan uji glejster dengan melihat probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan yaitu 5% atau 0,05. Hasil uji heteroskedastisitas ditunjukkan dalam tabel 4.15.

Tabel 4.15
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel Independen	<i>Sig.</i>
SAP	0,120
SDM	0,899
SPI	0,962
KO	0,901
TI	0,071
RK	0,512

Sumber: Data primer, diolah 2019

Berdasarkan hasil uji glejster yang ditunjukkan pada tabel 4.15 dapat diketahui bahwa hasil *Sig.* seluruh variabel independen lebih besar dari nilai

signifikansi 5% (0,05). Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

4.4 Uji Hipotesis

4.4.1 Koefisien Determinan (R^2)

Untuk mengukur tingkat kemampuan model dalam menjelaskan variasi dari variabel dependen menggunakan uji koefisien determinan (R^2).

Tabel 4.16
Uji R Square

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,912 ^a	,832	,824	,15223

a. Predictors: (Constant), RK, SDM, TI, SPI, KO, SAP

b. Dependent Variable: KLK

Sumber: Data primer, diolah 2019

Berdasarkan hasil uji determinan (R^2) yang ditunjukkan pada tabel 4.16, menunjukkan bahwa hasil *Adjusted R Square* sebesar 0,824 atau 82,4%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebesar 82,4% variabel kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Sleman dapat dijelaskan oleh variabel implementasi standar akuntansi pemerintah, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, komitmen organisasi, pemanfaatan teknologi informasi dan rekonsiliasi. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 17,6% variabel

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sleman dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian.

4.4.2 Uji Kelayakan (Uji F)

Uji F atau Uji kelayakan digunakan untuk mengetahui kelayakan model regresi linier berganda sebagai alat analisis. Uji Anova digunakan untuk uji F. Hasil pengujian ditunjukkan dalam tabel 4.17.

 **Tabel 4.17**
Uji Anova

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	13,770	6	2,295	99,036	,000 ^b
	Residual	2,781	120	,023		
	Total	16,551	126			

a. Dependent Variable: KLK

b. Predictors: (Constant), RK, SDM, TI, SPI, KO, SAP

Sumber: Data primer, diolah 2019

Berdasarkan hasil uji anova yang ditunjukkan pada tabel 4.17 menunjukkan bahwa nilai *Sig.* sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05 (nilai signifikansi). Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa model regresi memiliki tingkat kesesuaian model yang baik.

4.4.3 Uji T

Untuk menguji signifikansi hubungan antara variabel independen (X) dan variabel dependen (Y) menggunakan uji t. Terdapat dua kriteria dalam

pengambilan keputusan apakah H_a didukung atau tidak didukung yaitu dengan nilai signifikansi $t < 0,05$ dan tanda koefisien regresi yang sesuai dengan prediksi. Hasil dari pengujian hipotesis ditunjukkan pada tabel 4.18.

Tabel 4.18

Uji Statistik t

		Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics	
Model		B	Std. Error	Beta	T	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	-,064	,152		-,423	,673		
	SAP	,175	,083	,140	2,103	,038	,317	3,159
	SDM	,119	,052	,130	2,271	,025	,427	2,342
	SPI	,357	,066	,346	5,367	,000	,338	2,961
	KO	-,009	,066	-,009	-,139	,890	,352	2,842
	TI	,140	,056	,156	2,497	,014	,359	2,783
	RK	,245	,046	,293	5,302	,000	,460	2,176

a. Dependent Variable: KLK

Sumber: Data primer, diolah 2019

Berdasarkan hasil keseluruhan yang ditunjukkan dalam tabel 4.17 dapat dibuat persamaan baru yaitu, sebagai berikut:

$$Y = -0,64 + 0,175SAP + 0,119SDM + 0,357SPI - 0,009KO + 0,140TI + 0,245RK + \varepsilon$$

4.5 Hasil Uji Hipotesis

Tabel 4.19

Hasil Uji Hipotesis

	β	T	Sig.	Keterangan
Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah	0,175	2,103	0,038	Didukung
Kompetensi Sumber Daya Manusia	0,119	2,271	0,025	Didukung
Sistem Pengendalian Internal	0,357	5,367	0,000	Didukung
Komitmen Organisasional	-0,009	-0,139	0,890	Tidak Didukung
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,140	2,497	0,014	Didukung
Rekonsiliasi	0,245	5,302	0,000	Didukung

Sumber: Data primer, diolah 2019

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Hasil Pengujian Hipotesis 1

Tabel 4.19 menunjukkan hasil bahwa nilai koefisien pada variabel implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menunjukkan nilai positif 0,175 dan nilai signifikansi sebesar 0,038 yang lebih kecil dari 0,05 (α). Dari hasil yang ditunjukkan, dapat disimpulkan bahwa variabel implementasi Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga H_{a1} didukung.

2. Hasil Pengujian Hipotesis 2

Tabel 4.19 menunjukkan hasil bahwa nilai koefisien pada variabel kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) menunjukkan nilai positif 0,119 dan nilai signifikansi sebesar 0,025 yang lebih kecil dari 0,05 (α). Dari hasil yang ditunjukkan, dapat disimpulkan bahwa variabel kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga H_{a2} didukung.

3. Hasil Pengujian Hipotesis 3

Tabel 4.19 menunjukkan hasil bahwa nilai koefisien pada variabel Sistem Pengendalian Internal (SPI) menunjukkan nilai positif 0,357 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 (α). Dari hasil yang ditunjukkan, dapat disimpulkan bahwa variabel Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga H_{a3} didukung.

4. Hasil Pengujian Hipotesis 4

Tabel 4.19 menunjukkan hasil bahwa nilai koefisien pada variabel Komitmen Organisasional (KO) menunjukkan nilai koefisien -0,009 dan nilai signifikansi sebesar 0,890 yang lebih besar dari 0,05 (α). Dari hasil yang ditunjukkan, dapat disimpulkan bahwa variabel Komitmen Organisasional tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga H_{a4} tidak didukung.

5. Hasil Pengujian Hipotesis 5

Tabel 4.19 menunjukkan hasil bahwa nilai koefisien pada variabel pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) menunjukkan nilai positif 0,140 dan nilai signifikansi sebesar 0,014 yang lebih kecil dari 0,05 (α). Dari hasil yang ditunjukkan, dapat disimpulkan bahwa variabel pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga H_{a5} didukung.

6. Hasil Pengujian Hipotesis 6

Tabel 4.19 menunjukkan hasil bahwa nilai koefisien pada variabel Rekonsiliasi (RK) menunjukkan nilai positif 0,245 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 (α). Dari hasil yang ditunjukkan, dapat disimpulkan bahwa variabel Rekonsiliasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga H_{a6} didukung.

4.6 Pembahasan

4.6.1 Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP memiliki kekuatan hukum sebagai usaha untuk memperbaiki kualitas pelaporan keuangan dalam Pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, dapat

disimpulkan bahwa standar akuntansi pemerintah (SAP) merupakan komponen yang penting dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) harus memahami dan mengimplementasikan SAP ke dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Implementasi SAP diperlukan agar kualitas laporan keuangan yang disajikan dapat terjamin dan dapat terhindar dari kerugian yang timbul akibat kesalahan yang terdapat dalam laporan keuangan.

Hasil pengujian menyatakan bahwa hipotesis pertama (H_1) yaitu pengaruh implementasi standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah terbukti didukung. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Standar Akuntansi Pemerintah sudah berjalan efektif pada pemerintah Kabupaten Sleman dan telah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. Penyusunan laporan keuangan telah mengikuti kaidah yang berlaku dengan mengikuti Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) yang terdapat dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan telah memenuhi kualitas laporan keuangan yang ditentukan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 dibuktikan dengan didapatkannya opini Wajar Tanpa Pengecualian tanpa paragraf penjas atau catatan tambahan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman periode 2017.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian Suwanda (2015) yang menyatakan bahwa implementasi SAP

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas LKPD. Hal ini membuktikan bahwa semakin baik SAP yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian LKPD maka akan semakin baik kualitas LKPD yang dihasilkan.

4.6.2 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menilai kompetensi sumber daya manusia khususnya Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) dalam melaksanakan fungsinya yaitu salah satunya dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah dapat dilihat dari seberapa besar pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh PPK-SKPD tersebut dan didukung oleh perilaku dari individu dalam menangani tugas dan tanggung jawab masing-masing. Pengetahuan dan keterampilan setiap pegawai dapat dilihat dari latar belakang pendidikan dibagian akuntansi/pengelolaan keuangan di OPD Kabupaten Sleman. Perilaku individu dapat dilihat dari deskripsi jabatan dari masing-masing pegawai. Semakin jelas pembagian jabatan yang dilakukan maka semakin baik tugas tersebut dapat dilaksanakan.

Hasil pengujian menyatakan bahwa hipotesis kedua (H_2) yaitu pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah terbukti didukung. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kondisi kompetensi sumber daya manusia pada bagian pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten Sleman sudah mulai mencukupi dan dapat menyusun laporan keuangan dengan mengikuti standar yang berlaku. Hal ini didukung oleh

beberapa pegawai di OPD Kabupaten Sleman yang memiliki latar belakang pendidikan sarjana maupun diploma sebesar 83,4% dan berlatar pendidikan akuntansi dan manajemen sebesar 59,8%. Dilihat dari pengetahuan dan keterampilan pegawai bagian pengelola keuangan sudah dapat dikatakan baik dan dilihat dari perilaku individu dalam melaksanakan tugas yang diserahkan sudah dapat dikatakan baik karena dalam OPD Kabupaten Sleman telah menerapkan pembagian tugas yang cukup baik dilihat dari deskripsi jabatan yang diemban oleh masing-masing pegawai pengelola keuangan OPD Kabupaten Sleman.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Astika dan Yasa (2018) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Semakin baik kompetensi yang dimiliki PPK-SKPD maka akan semakin baik kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan.

Namun, hasil penelitian tidak sejalan dengan penelitian Suwanda (2015) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini disebabkan oleh perbedaan kondisi responden di daerah yang diteliti oleh Suwanda (2015) yang menunjukkan bahwa kondisi sumber daya manusia di sub-bagian akuntansi atau keuangan dalam hal jumlah maupun kualifikasi kurang mencukupi. Dalam hal kuantitas, hanya terdapat beberapa karyawan akuntansi dalam satu unit. Dalam hal kualifikasi, mayoritas

sumber daya manusia di bagian akuntansi atau administrasi keuangan tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi.

4.6.3 Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sistem pengendalian internal menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah proses yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan maupun seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang mencukupi atas tercapainya tujuan pemerintah daerah melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Adanya sistem pengendalian internal membuat pemerintah dapat menekan kemungkinan terjadinya kecurangan.

Hasil pengujian menyatakan bahwa hipotesis ketiga (H_3) yaitu pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah terbukti didukung. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal pada pemerintah Kabupaten Sleman telah berjalan efektif dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Dalam penyusunan laporan keuangan telah ditentukan pembagian kewenangan dan tanggung jawab yang jelas sehingga dapat meminimalisasi kecurangan yang dapat terjadi. Prosedur otorisasi telah dilakukan dengan baik sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dan pimpinan telah melakukan pemantauan dengan selalu mereviu dan mengevaluasi informasi dan melakukan perbaikan sehingga pimpinan dapat mengurangi risiko pelanggaran yang terjadi.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Pradono dan Basukianto (2015) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Namun, hasil penelitian tidak sejalan dengan penelitian Suwanda (2015) yang menyatakan bahwa implementasi sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini disebabkan karena perbedaan kondisi responden OPD di daerah yang diteliti oleh Suwanda (2015) yaitu tidak tercapainya perbaikan sistem pengendalian internal yaitu keandalan pelaporan.

4.6.4 Pengaruh Komitmen Organisasional terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil dari pengujian menyatakan bahwa hipotesis keempat (H_4) yaitu pengaruh komitmen organisasional terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tidak didukung bukti. Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa komitmen organisasional yang dimiliki oleh pegawai Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) tidak berpengaruh dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan.

Hasil penelitian tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Suwanda (2015) yang menyatakan bahwa komitmen organisasional berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Suwanda

(2015) menyatakan bahwa semakin tingginya komitmen organisasional yang dimiliki oleh PPK-SKPD maka mendorong PPK-SKPD untuk dapat bekerja selaras dengan tujuan yang ingin dicapai pemerintah salah satunya dengan cara menyusun dan menyajikan LKPD dengan kualitas yang semakin baik. Perbedaan hasil ini kemungkinan disebabkan oleh perbedaan keadaan responden yang diteliti dan perbedaan pendapat yang dimiliki oleh responden yang diteliti.

Hasil yang didapat dari penelitian di OPD Kabupaten Sleman kemungkinan disebabkan oleh adanya faktor-faktor lain yang lebih penting dalam mendorong peningkatan hasil laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas bagus, tidak hanya bermodalkan komitmen saja. Pegawai pengelola keuangan yang tidak terlalu memiliki komitmen dapat menghasilkan laporan keuangan dengan kualitas yang baik karena adanya beberapa faktor salah satunya latar belakang pendidikan yang sesuai sehingga pengetahuan akan penyusunan laporan keuangan memadai. Begitupun sebaliknya, pegawai pengelola keuangan dengan komitmen yang tidak terlalu tinggi dapat membuat laporan keuangan buruk yang disebabkan bukan tidak dimilikinya komitmen yang tinggi, tetapi adanya faktor lain seperti latar pendidikan yang tidak mendukung sehingga kualitas laporan keuangan yang dihasilkan kurang bagus. Oleh karena itu, hasil pengujian tersebut kemungkinan berasal dari pegawai di OPD Kabupaten Sleman yang memiliki komitmen organisasional yang tinggi ataupun tidak tinggi tetapi dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas baik terbukti dengan didapatkannya opini Wajar Tanpa Pengecualian dan tanpa paragraf penjelasan atau catatan tambahan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Astika dan Yasa (2018) yang menyatakan bahwa komitmen organisasional tidak mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini ditunjukkan dari hasil survei yang menyatakan bahwa mayoritas pegawai memiliki komitmen yang tinggi terhadap organisasi, namun demikian komitmen organisasional tidak cukup untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah dengan kualitas yang baik.

4.6.5 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 dijelaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik sebagai langkah dalam menindaklanjuti proses pembangunan yang sesuai dengan prinsip *Good Governance*.

Hasil pengujian menyatakan bahwa hipotesis kelima (H₅) yaitu pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah terbukti didukung. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi oleh pegawai dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah telah dimanfaatkan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan proses akuntansi hingga pembuatan laporan keuangan yang telah terkomputerisasi di sebagian besar OPD Kabupaten Sleman. Komputer

yang dimiliki telah cukup banyak, jaringan internet telah tersedia, dan fasilitas tersebut telah dimanfaatkan dengan baik sehingga proses pengiriman informasi dan komunikasi para pegawai menjadi lebih baik. Meskipun terdapat beberapa OPD yang jaringan internetnya kurang begitu lancar namun masih bisa ditangani dengan baik sehingga proses pengiriman informasi tidak terlalu terhambat. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Sleman dapat dikatakan telah memanfaatkan teknologi informasi dengan baik, sehingga para pegawai dan karyawannya dapat memanfaatkan kemudahan dari penggunaan teknologi informasi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Alamsyah, Muslih dan Rahayu (2018) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Namun, hasil penelitian tidak sejalan dengan penelitian Suwanda (2015) yang menyatakan hal sebaliknya bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini disebabkan karena kondisi responden di daerah yang diteliti oleh Suwanda (2015) berbeda yaitu penggunaan teknologi informasi pada OPD di daerah yang diteliti oleh Suwanda (2015) belum optimal dan penggunaan teknologi informasi membutuhkan biaya yang besar. Beberapa sumber daya manusia di pemerintah daerah juga tidak terlalu menguasai teknologi informasi.

4.6.6 Pengaruh Rekonsiliasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2013 menjelaskan bahwa rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/ subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama. Rekonsiliasi merupakan salah satu faktor penting untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Rekonsiliasi dibutuhkan untuk menghindari adanya perbedaan pencatatan yang berdampak pada validitas dan akurasi data yang tersaji dalam laporan keuangan.

Hasil pengujian menyatakan bahwa hipotesis keenam (H_6) yaitu pengaruh rekonsiliasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah terbukti didukung. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa rekonsiliasi telah dilakukan dengan baik oleh bagian keuangan setiap OPD Kabupaten Sleman. Rekonsiliasi internal telah dilaksanakan setiap bulan untuk meningkatkan akurasi laporan keuangan. Rekonsiliasi telah dilaksanakan dengan tepat dan akurat untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian tanpa paragraf penjelas dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Pradono & Basukianto (2015) yang menyatakan bahwa rekonsiliasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI), Komitmen Organisasional, pemanfaatan Teknologi Informasi (TI), rekonsiliasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Sleman.

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka terdapat lima variabel independen yang terbukti berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Lima variabel tersebut adalah Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), penerapan Sistem Pengendalian Intenal (SPI), pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) dan rekonsiliasi. Dari hasil tersebut dapat diartikan bahwa variabel independen Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), penerapan Sistem Pengendalian Intenal (SPI), pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) dan rekonsiliasi dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Namun, terdapat satu variabel independen yang tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu komitmen organisasional. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa tinggi atau rendahnya komitmen organisasional yang dimiliki oleh pegawai OPD Kabupaten Sleman tidak

berpengaruh dalam meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan.

5.2 Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa hal yang dapat dipertimbangkan, yakni:

1. Pegawai Divisi Keuangan SKPD

Bagi pegawai bagian keuangan di setiap SKPD dalam Kabupaten Sleman, hasil dari penelitian diharapkan dapat dijadikan pertimbangan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, hasil dari penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi para pegawai untuk meningkatkan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam peningkatan kualitas laporan keuangan, seperti lebih meningkatkan pemahaman akan SAP, meningkatkan kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing pegawai, meningkatkan sistem pengendalian internal yang telah diterapkan, meningkatkan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi informasi yang telah tersedia dan lebih meningkatkan frekuensi dalam pelaksanaan rekonsiliasi. Diharapkan untuk faktor-faktor yang telah disebutkan untuk ditingkatkan agar pemerintah daerah Kabupaten Sleman dapat mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas LKPD yang dihasilkan agar opini WTP tanpa paragraf penjas yang telah didapatkan dapat dipertahankan dengan baik.

2. Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi dasar untuk mengembangkan penelitian selanjutnya, khususnya pada bidang yang sama yaitu analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

5.3 Keterbatasan Penelitian

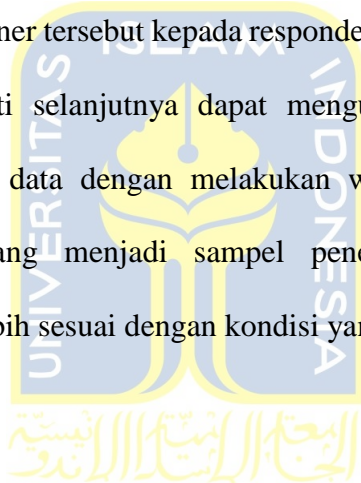
Dalam melaksanakan penelitian ini, terdapat beberapa keterbatasan yang mungkin akan mempengaruhi hasil penelitian. Adapun beberapa keterbatasan, sebagai berikut:

1. Waktu pengumpulan kuesioner yang lama dan pada saat kuesioner akan diambil masih banyak kuesioner yang belum siap sehingga memakan waktu.
2. Terdapat beberapa responden yang tidak paham dengan pernyataan yang terdapat dalam kuesioner.
3. Pengumpulan data hanya ditekankan pada penyebaran kuesioner yang bersifat sesaat sehingga memiliki keterbatasan dalam menggali lebih dalam gambaran/kondisi riil di SKPD dan data yang didapat tergantung pada asumsi bahwa responden menjawab dengan jujur dan sesuai kondisi riil.

5.4 Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang ada, terdapat beberapa saran yang dapat digunakan untuk memperoleh hasil yang lebih baik, yakni sebagai berikut:

1. Waktu pengambilan kuesioner kembali dicantumkan dalam kuesioner atau diberitahu saat kuesioner dibagikan sehingga lebih tertib dan saat penagihan kuesioner tidak memakan waktu lama.
2. Untuk penelitian selanjutnya dapat memilih kuesioner yang lebih mudah dipahami oleh responden atau saat dibagikan dapat dijelaskan terlebih dahulu kuesioner tersebut kepada responden agar responden lebih paham.
3. Untuk peneliti selanjutnya dapat mengubah atau menambah teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara langsung terhadap responden yang menjadi sampel penelitian sehingga hasil yang didapatkan lebih sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, M. K., Afifudin, dan Junaidi. (2018). Pengaruh Implementasi Sistem Manajemen Daerah (SIMDA), Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Penerapan Standar Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang. *Jurnal Riset Akuntansi*, 07(10), 130–141.
- Alamsyah, M. R., Rahayu, S., dan Muslih, M. (2018). Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota. *Jurnal Majalah Ilmiah Unikom*, 15(2), 201–210.
- Astika, I. B. P., dan Yasa, G. W. (2018). Kemampuan Komitmen Organisasi Memoderasi Kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan dan SPI pada Kualitas Laporan Keuangan Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 22(1), 301–325.
- Aswandi, W. (2018). Pengaruh Kompetensi SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi Akuntansi dan Pengawasan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Sektor Publik (Studi empiris pada organisasi nirlaba di Kota Padang). *E-Journal Universitas Negeri Padang*, 1–21.
- Erawati, T., dan Abdulhadi, M. F. (2018). Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kapasitas Sumber Daya Manusia, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta). *Jurnal Akuntansi & Manajemen Akmenika*, 15(1), 67–78.
- Ghozali, I. (2011). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19 (Edisi Kelima). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- _____. (2013). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Haryanto, d. (2007). Akuntansi Sektor Publik (Edisi 5). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Horngren, C., Harrison, W., dan Bamber, L. (2002). Accounting (5th Edition). New Jersey: Prentice Hall Inc.
- Hutapea, T. (2008). Kompetensi Plus. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum.

- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2012). Standar Akuntansi Keuangan 2012. Jakarta.
- Indriasari, D., dan Nahartyo, E. (2008). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir). In *Simposium Nasional Akuntansi XI*. Pontianak, Indonesia, 23-26 Juli.
- Indriasih, D. (2014). The Effect of Government Apparatus Competence and the Effectiveness of Government Internal Control Toward the Quality of Financial Reporting in Local Government. *Research Journal of Finance and Accounting*, 5(20), 38–47.
- Kusumo, G. R. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul). *Skripsi Universitas Islam Indonesia*.
- Latjandu, I., Kalangi, L., dan Tinangon, J. J. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Akuntansi Sektor Publik*, 5(2), 98–109.
- Lubis, A. (2014). Akuntansi Keperilakuan (Edisi 2). Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2006). Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 2(1).
- McNally, J. S. (2013). The 2013 COSO Framework & SOX Compliance: One Approach to an Effective Transition. *Strategic Finance*, 3(5), 1–9. Retrieved from <http://www.coso.org/guidance.htm>
- Modo, sintike mentari, Saerang, david paul elia, dan Poputra, agus tony. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*, 7(2), 14–30.
- Ningrum, K. K. (2018). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen. *Skripsi Universitas Islam Indonesia*.
- Pemerintah Republik Indonesia (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta.

- Pemerintah Republik Indonesia (2005). *Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia (2008). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia (2008). *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia (2010). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta.
- Pradono, F. C., dan Basukianto. (2015). Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah : Faktor yang Mempengaruhi dan Implikasi Kebijakan (Studi Pada SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 22(2), 188–200.
- Rahmadani, S. (2015). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Bar. *Jurnal Online Mahasiswa*, 2(2), 1–15.
- Romney, M., dan Steinbart, P. (2015). *Sistem Informasi Akuntansi (Edisi 13)*. (K. Safira, dan N. Puspasari, Trans.) Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Setyowati, L., Isthika, W., dan Pratiwi, R. D. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang. *Kinerja Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 20(2), 179–192.
- Siahaan, A. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Ambon. *Skripsi Universitas Hasanuddin*.
- Siahaya, E., Asnawi, M., dan Layuk, P. K. A. (2018). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 3(1), 1–16.

- Sukmaningrum, T. (2012). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Semarang). *Skripsi Universitas Diponegoro*.
- Surastiani, D. P., dan Handayani, B. D. (2015). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 7(2), 139–149.
- Suwanda, D. (2015). Factors Affecting Quality of Local Government Financial Statements to Get Unqualified Opinion (WTP) of Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK). *Research Journal of Finance and Accounting*, 6(4), 139–157.
- Tambunan, B. P. M. (2012). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan pada Satuan Kerja (SATKER) Di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. *Skripsi Universitas Sumatera Utara*.
- Trisnani, E. D., Dimiyati, M., dan Paramu, H. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Laporan Keuangan dengan Mediasi Penatausahaan Aset Tetap. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 11(3), 271–282.
- Wahyuni, S., Fadah, I., dan Tobing, D. S. (2018). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan melalui Pengelolaan Barang Milik Daerah. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 12(1), 22–80.
- Weygandt, J., Kieso, D., dan Kell, W. (1996). *Accounting Principles, 4th Edition* . USA: John, Wiley, & Sons, Inc.
- Widodo, J. (2001). *Good Governance: Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Surabaya: Insan Cendekia.
- Yendrawati, R. (2013). Pengaruh sistem pengendalian intern dan kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas informasi laporan keuangan dengan faktor eksternal sebagai variabel moderating. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 17(2), 166–175.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Kuesioner Penelitian



Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

www.uui.ac.id

Perihal : Mohon Bantuan Pengisian Kuesioner

Kepada Yth.

Bpk/Ibu/Sdr Responden

Di Tempat

Dengan Hormat,

Dalam rangka penelitian untuk penyusunan tugas akhir Strata Satu (S1) pada Program Studi Akuntansi Universitas Islam Indonesia dengan judul “ Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Internal, Komitmen Organisasional, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Rekonsiliasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sleman)”.

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon bantuan kesediaan Bapak/Ibu/Sdr untuk menjadi responden dalam penelitian ini dan mengisi secara objektif kuesioner terlampir. Partisipasi Bapak/Ibu/Sdr akan sangat membantu dalam keberhasilan penelitian ini.

Demikian surat pengantar ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu/Sdr saya mengucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

Tertia Ulima Rahma

Mahasiswi

KUESIONER PENELITIAN

IDENTITAS RESPONDEN

Dimohon dengan hormat Bapak/Ibu untuk mengisi identitas secara lengkap (kecuali untuk nama boleh tidak diisi). Setiap pertanyaan diharapkan hanya ada satu jawaban untuk menjamin validitas data.

- Nama : (boleh tidak diisi)
- Jenis Kelamin : Laki-Laki Perempuan
- Umur (tahun) : < 20 20-35 36-50 >50
- Gelar/Strata : D3 S1 S2 S3 lainnya
- Latar Belakang Pendidikan : Akuntansi Manajemen Pertanian
 Lainnya, sebutkan
- Lama Berada di PEMDA : 1-5 thn 6-10 thn > 10 thn
- Jabatan / Pangkat :
- Nama OPD :

Petunjuk Pengisian

Format Skala Responden

1 Sangat Tidak Setuju (STS)

2 Tidak Setuju (TS)

3 Setuju (S)

4 Sangat Setuju (SS)

Peneliti mengharapkan Bapak dan Ibu memilih salah satu (STS/TS/S/SS) dengan memberi tanda *check list* (V), terkait dengan pertanyaan yang diberikan sesuai dengan kondisi dalam unit kerja Bapak/Ibu.

DAFTAR PERTANYAAN

1. Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah

No	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
PSAP No. 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan					
1	Penyusunan laporan keuangan pada instansi tempat saya bekerja telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. <i>Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.</i>				
2	Pada instansi tempat saya bekerja, telah menggunakan basis akrual untuk mengakui aset dan kewajiban				
3	Pada instansi tempat saya bekerja, telah menggunakan basis kas untuk mengakui pendapatan dan belanja				
PSAP No. 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran					
4	Pada instansi tempat saya bekerja, telah mencatat pendapatan sesuai dengan asas bruto				
5	Pada instansi tempat saya bekerja, pengeluaran dari rekening kas telah diakui sebagai belanja				
6	Pada instansi tempat saya bekerja, penerimaan pembiayaan diakui saat diterima di rekening kas				
PSAP No. 3 tentang Laporan Arus Kas					
7	Telah menyusun Laporan Arus sesuai SAP yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, pendanaan, dan investasi				
8	Telah menggunakan metode langsung dalam melakukan arus kas operasi				

No	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
PSAP No. 4 tentang Catatan Atas Laporan Keuangan					
9	Pada instansi tempat saya bekerja, telah menyajikan catatan atas laporan keuangan yang meliputi penjelasan pos-pos yang ada dalam laporan keuangan				
PSAP No. 5 tentang Akuntansi Persediaan					
10	Pada instansi tempat saya bekerja, telah mengakui persediaan pada saat diterima atau hak milik berpindah				
11	Pada instansi tempat saya bekerja, pencatatan persediaan telah dilakukan berdasarkan inventarisasi fisik				
PSAP No. 6 tentang Akuntansi Investasi					
12	Pada instansi tempat saya bekerja, telah mengakui kas yang dikeluarkan sebagai investasi setelah memenuhi kriteria manfaat masa datang dapat diperoleh dan nilai investasi dapat diukur				
PSAP No. 7 tentang Aset Tetap					
13	Pada instansi tempat saya bekerja, telah mengklasifikasikan aset tetap berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam operasi entitas				
14	Pada instansi tempat saya bekerja, telah mencatat aset tetap sebesar biaya perolehan				
PSAP No. 8 tentang Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan					
15	Pada instansi tempat saya bekerja, telah mengungkapkan informasi konstruksi dalam pengerjaan				

No.	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
16	Pada instansi tempat saya bekerja, telah memindahkan konstruksi dalam pengerjaan ke aset tetap jika pengerjaan konstruksi telah selesai				
PSAP No. 9 tentang Akuntansi Kewajiban					
17	Pada instansi tempat saya bekerja, kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul dan dicatat sesuai dengan nilai nominal				
PSAP No. 10 tentang Koreksi Kesalahan					
18	Pada instansi tempat saya bekerja, telah melakukan koreksi yang merupakan tindakan pembetulan agar pos-pos yang tersaji sesuai dengan seharusnya				
PSAP No. 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasi					
19	Pada instansi tempat saya bekerja, telah menyajikan laporan keuangan konsolidasi yang mencakup semua laporan keuangan dari semua entitas akuntansi				
PSAP No. 12 tentang Laporan Operasional					
20	Pada instansi tempat saya bekerja, telah menyusun laporan operasional yang mencakup pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa pada periode akuntansi				

2. Kompetensi Sumber Daya Manusia

No	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
Pengetahuan (<i>Knowledge</i>)					
1	Saya memahami Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual dengan baik				
2	Saya memahami pedoman mengenai prosedur dan proses akuntansi dengan baik				
Keahlian dan Kemampuan (<i>Skill</i>)					
3	Saya mampu membuat jurnal dan posting jurnal ke dalam buku besar dengan benar				
4	Saya mampu menyusun dan menyajikan Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan dengan baik				
Perilaku (<i>Attitude</i>)					
5	Saya selalu bekerja dengan mengedepankan etika dan kode etik sebagai akuntan				
6	Saya selalu menolak setiap intervensi dari atasan yang dapat menimbulkan pelanggaran terhadap peraturan				

3. Sistem Pengendalian Internal

No	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
Lingkungan Pengendalian					
1	Pimpinan telah menetapkan aturan mengenai perilaku dan standar etika pegawai				
2	Struktur organisasi OPD telah menggambarkan pembagian kewenangan dan tanggung jawab pegawai				

No	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
3	Pimpinan OPD selalu mengambil tindakan tegas atas pelanggaran kebijakan, prosedur, atau perilaku pegawai				
Penilaian Risiko					
4	Pimpinan telah melakukan analisis risiko secara lengkap dan menyeluruh terhadap kemungkinan timbulnya pelanggaran terhadap sistem akuntansi				
5	Pimpinan selalu memiliki rencana pengelolaan atau mengurangi risiko pelanggaran terhadap sistem dan prosedur akuntansi				
Kegiatan Pengendalian					
6	Prosedur otorisasi dokumen transaksi yang baik dan ketepatan input dan/atau posting data berpengaruh pada kualitas informasi laporan keuangan yang dihasilkan				
7	Pegawai dan atasan telah memahami tujuan dari kegiatan pengendalian				
Informasi dan Komunikasi					
8	Informasi telah disediakan secara tepat waktu dan memungkinkan untuk dilakukan tindakan korektif secara tepat				
9	Saluran komunikasi berkelanjutan telah dilaksanakan secara terbuka dan efektif dengan masyarakat dan aparat pengawas internal dalam memberikan masukan signifikan				

No	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
Pemantauan					
10	Pimpinan selalu mereviu dan mengevaluasi temuan yang menunjukkan adanya kelemahan dan perlu perbaikan				

4. Komitmen Organisasional

No	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
Komitmen Afektif					
1	Saya merasa sudah menjadi bagian dari organisasi ini				
2	Saya merasa masalah yang terjadi di instansi menjadi permasalahan saya juga				
Komitmen Normatif					
3	Saya bekerja melaksanakan program sesuai dengan visi dan misi instansi tempat saya bekerja				
Komitmen Berkelanjutan					
4	Saya merasa bahwa berada di instansi tempat saya bekerja merupakan kesempatan terbaik membangun karir				
5	Saya berusaha meningkatkan prestasi dan menunjukkan sikap positif di instansi tempat saya bekerja				

5. Pemanfaatan Teknologi Informasi

No	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
Komputer					
1	Proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan dilakukan secara komputerisasi				
2	Pengelolaan data transaksi keuangan menggunakan <i>software</i> yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan				
3	Terdapat sistem keamanan komputer (antivirus) dan menerapkan penjadwalan pemeliharaan komputer secara teratur				
Jaringan Internet					
4	Jaringan internet di instansi tempat saya bekerja selalu dalam kondisi yang baik/lancar untuk digunakan				
5	Saya sebagai pengelola keuangan/akuntansi telah memanfaatkan jaringan internet di unit sebagai penghubung dalam pengiriman informasi yang dibutuhkan				

6. Rekonsiliasi

No	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
1	Pelaksanaan rekonsiliasi internal dilakukan setiap bulan				
2	Rekonsiliasi internal meningkatkan akurasi laporan keuangan pada unit akuntansi keuangan (Sistem Akuntansi Keuangan/SAK) dan unit akuntansi barang (Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara/SIMAK BMN)				
3	Pelaksanaan rekonsiliasi dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk menyamakan data pengeluaran satuan kerja dengan data pengeluaran KPPN				
4	Rekonsiliasi data dengan KPPN menghasilkan data akuntansi yang akurat dan terpercaya, yang berguna dalam menghasilkan laporan keuangan yang kredibel dan terpercaya				
5	Rekonsiliasi yang tepat dan akurat dapat mempertahankan opini BPK, Wajar Tanpa Pengecualian (<i>Unqualified Opinion</i>) tanpa paragraf penjelasan				

7. Kualitas Laporan Keuangan

No	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
Relevan					
1	Informasi dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh instansi tempat saya bekerja dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja di masa lalu				
2	Laporan keuangan disajikan secara tepat waktu				
3	Informasi dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh instansi tempat saya bekerja dibuat secara lengkap yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan				
Andal					
4	Transaksi yang disajikan oleh instansi tempat saya bekerja tergambar dengan jujur dalam laporan keuangan				
5	Informasi yang disajikan oleh instansi tempat saya bekerja bebas dari kesalahan yang bersifat material dan teruji kebenarannya				
6	Informasi dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh instansi tempat saya bekerja telah memenuhi kebutuhan para pengguna dari laporan keuangan pemerintah				
7	Informasi dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh instansi tempat saya bekerja berpihak kepada kepentingan daerah				

No	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
Dapat Dibandingkan					
8	Informasi dalam laporan keuangan yang disusun oleh instansi tempat saya bekerja selalu dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya				
Dapat Dipahami					
9	Informasi dalam laporan keuangan yang disusun oleh instansi tempat saya bekerja telah jelas sehingga dapat dipahami oleh pengguna				



Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (X1)																					
Res.	SAP1	SAP2	SAP3	SAP4	SAP5	SAP6	SAP7	SAP8	SAP9	SAP10	SAP11	SAP12	SAP13	SAP14	SAP15	SAP16	SAP17	SAP18	SAP19	SAP20	total
22	3	3	3	4	3	3	4	2	3	2	4	3	2	4	3	3	3	3	3	2	60
23	3	3	3	4	3	3	4	2	3	2	4	3	2	4	3	3	3	3	3	2	60
24	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	60
25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	60
26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	60
27	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	60
28	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	60
29	3	3	2	2	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	56
30	4	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	69
31	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	62
32	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	3	4	4	4	3	3	3	3	72
33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	60
34	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	59
35	3	2	3	3	3	2	3	3	3	4	3	4	3	3	2	3	2	3	3	3	58
36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	60
37	4	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	66
38	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	60
39	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	4	65
40	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	64
41	3	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	3	66
42	3	3	4	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	66
43	3	3	4	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	68

Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (X1)																					
Res.	SAP1	SAP2	SAP3	SAP4	SAP5	SAP6	SAP7	SAP8	SAP9	SAP10	SAP11	SAP12	SAP13	SAP14	SAP15	SAP16	SAP17	SAP18	SAP19	SAP20	total
66	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	64
67	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	60
68	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	80
69	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	60
70	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	60
71	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	60
72	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	63
73	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	58
74	3	3	2	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	57
75	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	61
76	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	61
77	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	60
78	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	60
79	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	60
80	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	60
81	4	3	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	66
82	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	58
83	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	58
84	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	60
85	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	60
86	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	80
87	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2	3	2	2	2	3	3	2	54

Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2)							
Res.	SDM1	SDM2	SDM3	SDM4	SDM5	SDM6	Total
1	2	3	2	2	3	3	15
2	3	3	4	4	3	4	21
3	3	3	3	4	3	4	20
4	3	3	3	3	3	3	18
5	3	3	3	3	4	3	19
6	3	3	3	3	3	3	18
7	3	3	3	3	3	3	18
8	3	3	3	3	3	3	18
9	3	3	3	3	3	3	18
10	3	3	3	3	3	3	18
11	3	3	3	3	3	3	18
12	3	3	3	3	3	3	18
13	3	3	3	3	3	3	18
14	3	3	3	3	3	3	18
15	3	3	3	3	3	3	18
16	3	3	3	3	3	3	18
17	3	3	3	3	3	3	18
18	3	3	3	3	3	3	18
19	4	4	4	4	3	3	22
20	3	3	3	3	3	3	18
21	3	3	3	3	3	3	18
22	4	4	4	4	3	3	22
23	4	4	4	4	3	3	22
24	3	3	2	3	3	3	17
25	3	3	3	3	3	3	18
26	3	3	2	3	3	3	17
27	3	3	3	3	3	3	18
28	3	3	3	3	3	3	18
29	3	3	3	3	3	3	18
30	3	3	3	3	3	4	19
31	3	3	3	4	3	3	19
32	3	3	3	3	3	3	18
33	3	3	3	3	3	3	18
34	2	2	2	2	2	3	13
35	2	2	2	2	3	3	14
36	3	3	3	3	3	3	18
37	3	3	4	3	3	4	20
38	3	3	2	2	3	3	16
39	3	3	3	4	3	3	19

Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2)							
Res.	SDM1	SDM2	SDM3	SDM4	SDM5	SDM6	Total
40	3	3	3	4	3	3	19
41	3	3	3	3	4	3	19
42	3	3	3	3	4	4	20
43	4	3	3	3	4	4	21
44	3	3	3	3	3	3	18
45	3	3	3	3	3	3	18
46	3	3	3	3	3	3	18
47	3	3	3	3	3	3	18
48	3	3	3	3	3	3	18
49	4	4	3	3	3	3	20
50	4	4	4	4	4	4	24
51	3	3	2	2	3	4	17
52	3	3	3	3	3	3	18
53	3	3	4	3	3	3	19
54	2	2	4	4	4	4	20
55	3	3	3	3	3	3	18
56	3	4	3	3	4	3	20
57	4	3	3	3	3	4	20
58	4	4	4	4	4	4	24
59	3	3	3	3	3	3	18
60	3	4	3	3	4	4	21
61	2	3	3	3	3	3	17
62	4	4	4	4	4	4	24
63	3	4	4	4	4	4	23
64	4	4	4	4	4	4	24
65	3	3	3	3	3	3	18
66	4	3	3	3	4	4	21
67	2	2	2	2	3	3	14
68	4	4	4	4	4	4	24
69	3	3	3	3	3	3	18
70	3	4	4	4	4	4	23
71	3	3	3	3	3	3	18
72	3	3	3	3	3	3	18
73	3	3	3	3	3	3	18
74	3	3	3	3	3	3	18
75	3	3	3	3	3	3	18
76	2	2	2	2	2	3	13
77	3	3	2	3	3	3	17
78	2	2	2	2	3	3	14

Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2)							
Res.	SDM1	SDM2	SDM3	SDM4	SDM5	SDM6	Total
79	2	3	3	3	3	3	17
80	2	3	3	3	3	3	17
81	3	4	3	3	4	4	21
82	3	3	3	3	3	3	18
83	2	3	3	3	3	3	17
84	2	3	3	3	3	3	17
85	3	3	3	3	3	3	18
86	4	4	4	4	4	3	23
87	3	3	2	2	3	4	17
88	3	3	3	3	3	3	18
89	3	3	2	2	3	2	15
90	3	3	3	3	3	3	18
91	2	2	2	2	3	3	14
92	4	3	4	4	4	4	23
93	3	3	3	3	3	3	18
94	2	3	3	2	4	3	17
95	2	2	2	2	2	2	12
96	2	2	3	3	3	3	16
97	3	3	3	3	3	3	18
98	3	3	3	3	3	3	18
99	3	3	3	3	3	3	18
100	3	4	4	4	4	4	23
101	3	4	3	4	4	3	21
102	3	3	3	3	3	4	19
103	3	3	3	3	4	3	19
104	3	3	3	3	3	3	18
105	3	3	3	3	4	4	20
106	3	3	3	3	3	3	18
107	2	2	3	3	3	3	16
108	3	3	3	3	3	3	18
109	3	3	3	3	3	3	18
110	3	3	3	3	3	3	18
111	3	3	3	3	3	3	18
112	3	3	3	3	3	3	18
113	3	3	4	4	4	3	21
114	3	3	3	4	4	3	20
115	3	3	4	3	4	3	20
116	3	3	3	3	3	3	18
117	3	3	3	3	3	3	18

Sistem Pengendalian Internal (X3)											
Res.	SPI1	SPI2	SPI3	SPI4	SPI5	SPI6	SPI7	SPI8	SPI9	SPI10	Total
103	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	39
104	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
105	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4	33
106	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
107	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
108	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
109	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
110	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
111	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
112	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
113	3	4	3	3	3	4	4	3	3	3	33
114	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
115	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	32
116	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
117	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
118	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
119	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
120	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
121	2	2	2	2	1	1	2	2	1	2	17
122	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
123	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	32
124	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
125	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
126	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
127	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30

Komitmen Organisasional (X4)						
Res.	KO1	KO2	KO3	KO4	KO5	Total
1	3	3	3	3	3	15
2	3	3	3	3	4	16
3	3	3	3	3	3	15
4	3	3	3	3	3	15
5	4	3	4	3	3	17
6	3	3	3	3	3	15
7	4	4	4	4	4	20
8	3	3	3	3	3	15
9	3	3	3	3	3	15
10	3	3	3	3	3	15

Komitmen Organisasional (X4)						
Res.	KO1	KO2	KO3	KO4	KO5	Total
11	4	4	4	3	3	18
12	4	3	3	3	4	17
13	3	3	3	3	3	15
14	3	3	4	3	3	16
15	3	3	3	3	3	15
16	3	3	3	3	2	14
17	3	3	3	3	3	15
18	3	3	3	3	3	15
19	3	3	4	3	3	16
20	3	3	3	3	3	15
21	3	3	3	3	3	15
22	3	4	4	3	3	17
23	3	3	4	3	3	16
24	3	3	3	3	3	15
25	3	3	3	3	3	15
26	4	3	3	3	3	16
27	3	3	3	3	3	15
28	3	2	3	3	3	14
29	3	3	3	2	3	14
30	3	3	4	3	3	16
31	3	3	3	3	3	15
32	4	4	4	3	3	18
33	3	2	3	3	3	14
34	3	2	3	3	3	14
35	3	2	3	2	3	13
36	3	3	3	3	3	15
37	4	3	4	3	4	18
38	3	3	3	3	3	15
39	4	3	3	3	4	17
40	3	3	4	4	3	17
41	3	3	3	3	4	16
42	3	3	3	4	3	16
43	4	3	3	3	3	16
44	3	3	3	3	3	15
45	3	3	3	3	3	15
46	3	3	3	3	3	15
47	3	3	3	3	3	15
48	3	3	3	3	3	15
49	4	4	4	4	4	20

Komitmen Organisasional (X4)						
Res.	KO1	KO2	KO3	KO4	KO5	Total
50	4	4	4	4	4	20
51	4	4	4	4	4	20
52	4	3	4	2	3	16
53	3	2	3	2	3	13
54	4	3	3	3	3	16
55	3	3	3	3	3	15
56	3	3	3	3	3	15
57	3	3	3	3	4	16
58	4	4	4	4	4	20
59	3	3	3	3	4	16
60	3	3	3	4	4	17
61	3	3	3	4	3	16
62	4	4	4	4	4	20
63	4	4	4	4	4	20
64	4	4	4	4	4	20
65	3	3	3	3	3	15
66	3	3	3	3	3	15
67	3	3	3	3	3	15
68	4	4	4	4	4	20
69	3	3	3	3	3	15
70	3	3	3	3	3	15
71	4	3	3	3	3	16
72	3	3	3	3	3	15
73	3	3	3	3	3	15
74	3	3	2	3	3	14
75	3	3	3	3	3	15
76	3	3	3	3	3	15
77	3	3	3	3	3	15
78	3	3	3	3	3	15
79	3	3	3	3	3	15
80	3	3	3	3	3	15
81	3	3	4	3	3	16
82	3	3	3	3	3	15
83	3	3	3	3	3	15
84	3	3	3	3	3	15
85	3	3	3	3	4	16
86	4	4	3	3	3	17
87	3	3	4	3	3	16
88	3	3	3	3	3	15

Komitmen Organisasional (X4)						
Res.	KO1	KO2	KO3	KO4	KO5	Total
89	3	3	3	3	3	15
90	3	3	3	3	3	15
91	3	3	3	2	3	14
92	4	4	4	4	4	20
93	3	3	3	3	3	15
94	3	3	4	2	3	15
95	3	3	3	2	3	14
96	4	3	3	3	4	17
97	3	3	3	3	3	15
98	3	3	3	3	3	15
99	3	3	3	3	4	16
100	4	4	4	3	3	18
101	3	3	3	4	3	16
102	3	3	3	3	3	15
103	4	4	4	4	4	20
104	3	3	3	3	3	15
105	4	4	4	3	3	18
106	3	3	3	3	3	15
107	3	3	3	3	3	15
108	3	3	3	3	3	15
109	3	3	3	3	3	15
110	3	3	3	3	3	15
111	3	3	3	3	3	15
112	3	3	3	3	3	15
113	4	3	3	3	3	16
114	3	3	3	3	3	15
115	3	3	3	3	3	15
116	4	3	3	3	3	16
117	3	3	3	3	3	15
118	3	3	3	3	3	15
119	3	3	3	3	3	15
120	3	3	3	3	3	15
121	2	2	2	1	1	8
122	3	3	3	3	3	15
123	3	3	3	3	3	15
124	4	3	3	3	3	16
125	3	3	3	3	3	15
126	3	3	3	3	3	15
127	3	3	3	3	3	15

Pemanfaatan Teknologi Informasi (X5)						
Res.	TI1	TI2	TI3	TI4	TI5	Total
1	3	3	3	3	3	15
2	3	3	3	3	4	16
3	3	4	3	3	3	16
4	3	3	3	3	3	15
5	3	3	3	3	4	16
6	3	4	4	3	3	17
7	4	4	2	4	4	18
8	3	3	3	3	3	15
9	4	4	4	3	4	19
10	3	3	3	3	3	15
11	3	3	4	3	3	16
12	3	3	3	3	3	15
13	3	3	3	3	3	15
14	3	3	3	4	3	16
15	3	3	3	3	3	15
16	3	3	3	3	3	15
17	3	3	3	3	3	15
18	3	3	3	3	3	15
19	3	4	4	3	3	17
20	3	3	3	3	3	15
21	3	3	3	3	3	15
22	3	4	4	3	3	17
23	3	4	4	3	3	17
24	3	3	3	3	3	15
25	3	3	3	3	3	15
26	3	3	3	2	4	15
27	3	3	3	3	3	15
28	3	3	3	3	3	15
29	3	3	3	3	3	15
30	4	4	3	3	4	18
31	4	4	3	3	3	17
32	4	4	4	3	3	18
33	3	3	3	3	3	15
34	3	3	3	2	3	14
35	3	4	2	2	3	14
36	3	3	3	3	3	15
37	4	4	3	3	4	18
38	3	3	3	3	3	15
39	4	4	4	3	3	18

Pemanfaatan Teknologi Informasi (X5)						
Res.	TI1	TI2	TI3	TI4	TI5	Total
40	3	3	3	4	3	16
41	3	4	3	3	4	17
42	3	4	3	3	3	16
43	4	3	3	4	3	17
44	3	3	2	3	3	14
45	3	3	3	3	3	15
46	3	3	3	2	3	14
47	3	3	3	3	3	15
48	3	3	3	2	3	14
49	4	4	4	4	4	20
50	4	4	4	4	4	20
51	4	4	4	4	4	20
52	4	4	3	3	3	17
53	3	3	3	3	3	15
54	4	4	4	3	4	19
55	3	3	3	3	3	15
56	3	3	4	3	3	16
57	4	4	4	4	3	19
58	4	4	4	3	3	18
59	4	3	3	3	3	16
60	3	3	3	3	3	15
61	4	4	4	4	3	19
62	4	4	4	4	4	20
63	4	4	4	4	4	20
64	4	4	4	4	4	20
65	3	3	3	3	3	15
66	4	4	4	4	4	20
67	3	3	3	3	3	15
68	4	4	4	4	4	20
69	3	3	3	3	3	15
70	1	3	3	3	3	13
71	3	3	3	3	3	15
72	3	3	3	3	3	15
73	3	3	3	3	3	15
74	3	3	3	3	2	14
75	3	3	3	2	3	14
76	3	3	3	3	2	14
77	3	3	3	3	3	15
78	3	3	3	3	3	15

Pemanfaatan Teknologi Informasi (X5)						
Res.	TI1	TI2	TI3	TI4	TI5	Total
79	3	3	3	3	3	15
80	3	3	3	3	3	15
81	3	3	3	3	3	15
82	3	3	3	3	3	15
83	3	3	3	3	3	15
84	3	3	3	3	3	15
85	4	3	3	3	4	17
86	4	4	4	4	4	20
87	3	3	3	3	3	15
88	3	3	3	3	3	15
89	3	3	3	3	3	15
90	3	3	3	3	3	15
91	3	3	3	3	3	15
92	4	4	4	4	4	20
93	3	3	3	4	4	17
94	3	3	3	3	3	15
95	3	3	3	3	3	15
96	4	4	3	2	4	17
97	3	3	3	2	3	14
98	3	3	3	2	3	14
99	4	4	4	4	3	19
100	4	4	4	4	3	19
101	3	3	3	3	4	16
102	3	4	4	4	4	19
103	4	4	4	4	4	20
104	3	3	3	3	3	15
105	3	3	3	3	3	15
106	3	3	3	3	3	15
107	3	3	3	3	3	15
108	3	3	3	3	3	15
109	3	3	3	3	3	15
110	3	3	3	3	3	15
111	3	3	3	3	3	15
112	3	3	3	3	3	15
113	4	4	4	4	4	20
114	4	4	4	4	4	20
115	4	4	4	4	3	19
116	3	3	3	3	3	15
117	3	3	3	3	4	16

Pemanfaatan Teknologi Informasi (X5)						
Res.	TI1	TI2	TI3	TI4	TI5	Total
118	4	3	3	3	4	17
119	4	4	3	3	4	18
120	3	3	3	3	4	16
121	2	1	2	1	1	7
122	3	3	4	3	4	17
123	3	3	3	4	3	16
124	3	3	3	3	3	15
125	3	3	3	3	3	15
126	3	3	3	3	4	16
127	3	3	3	3	3	15

Rekonsiliasi (X6)						
Res.	R1	R2	R3	R4	R5	total
1	3	3	3	3	3	15
2	3	4	3	3	4	17
3	4	4	3	3	4	18
4	4	4	4	4	4	20
5	3	4	3	3	3	16
6	3	3	3	3	4	16
7	4	4	2	2	3	15
8	3	3	3	3	3	15
9	3	3	3	3	3	15
10	3	3	3	3	3	15
11	3	3	3	3	3	15
12	3	3	3	3	3	15
13	3	3	3	3	3	15
14	3	3	3	3	2	14
15	3	3	4	3	3	16
16	3	3	2	3	3	14
17	3	3	3	3	2	14
18	3	3	3	3	3	15
19	3	4	4	3	3	17
20	3	3	3	3	3	15
21	3	3	3	3	3	15
22	3	4	4	3	3	17
23	3	4	4	3	3	17
24	3	3	3	3	3	15
25	3	3	3	3	3	15

Rekonsiliasi (X6)						
Res.	R1	R2	R3	R4	R5	total
26	3	3	3	3	3	15
27	3	3	3	3	3	15
28	3	3	3	3	3	15
29	3	3	3	3	3	15
30	4	4	4	4	3	19
31	3	3	4	4	3	17
32	4	3	3	3	3	16
33	3	3	3	3	3	15
34	3	3	2	2	3	13
35	2	2	2	2	3	11
36	3	3	3	3	3	15
37	3	3	3	3	3	15
38	3	3	3	3	3	15
39	3	3	3	3	4	16
40	3	3	3	3	4	16
41	3	3	3	3	4	16
42	3	3	3	3	3	15
43	3	3	4	4	3	17
44	2	3	2	3	3	13
45	2	3	2	3	3	13
46	2	3	2	3	3	13
47	2	3	2	3	3	13
48	2	3	2	3	3	13
49	4	4	4	4	4	20
50	4	4	4	4	4	20
51	4	4	4	4	4	20
52	4	4	2	2	4	16
53	3	3	3	3	3	15
54	4	4	4	4	4	20
55	3	3	3	3	3	15
56	4	3	3	4	3	17
57	3	4	3	3	3	16
58	4	4	3	3	3	17
59	3	3	4	4	3	17
60	3	3	3	3	3	15
61	4	3	3	3	3	16
62	4	4	4	4	4	20
63	4	4	4	4	4	20
64	4	4	4	4	4	20

Rekonsiliasi (X6)						
Res.	R1	R2	R3	R4	R5	total
65	3	3	3	3	3	15
66	4	4	4	4	4	20
67	4	3	3	3	3	16
68	4	4	4	4	4	20
69	3	3	3	3	3	15
70	4	4	4	4	4	20
71	3	3	3	3	3	15
72	3	3	3	3	3	15
73	3	3	3	3	3	15
74	3	3	3	3	2	14
75	3	3	3	3	3	15
76	3	3	2	2	3	13
77	3	3	3	3	3	15
78	3	3	3	3	3	15
79	3	2	2	2	3	12
80	3	2	2	2	3	12
81	3	4	3	3	3	16
82	3	3	3	3	3	15
83	3	3	2	2	3	13
84	3	3	2	2	3	13
85	4	4	3	3	3	17
86	3	3	3	3	3	15
87	3	3	3	3	3	15
88	3	3	3	3	3	15
89	3	3	3	3	3	15
90	3	3	2	2	2	12
91	3	3	3	3	3	15
92	4	4	4	4	4	20
93	3	3	3	3	3	15
94	3	3	3	3	3	15
95	3	3	3	3	3	15
96	4	4	4	4	3	19
97	4	4	4	3	3	18
98	4	4	4	3	3	18
99	3	3	3	3	3	15
100	3	3	3	3	3	15
101	4	4	4	4	4	20
102	4	4	4	4	4	20
103	4	4	4	4	4	20

	SAP1	SAP2	SAP3	SAP4	SAP5	SAP6	SAP7	SAP8	SAP9	SAP10	SAP11	SAP12	SAP13	SAP14	SAP15	SAP16	SAP17	SAP18	SAP19	SAP20	SAP	
SAP20 Pearson Correlation	,438**	,443**	,295**	,140	,350**	,219*	,215*	,435**	,475**	,631**	,249**	,119	,480**	,242**	,384**	,370**	,193*	,493**	,408**	1	,608**	
Sig. (2-tailed)	,000	,000	,001	,117	,000	,013	,015	,000	,000	,000	,005	,182	,000	,006	,000	,000	,030	,000	,000		,000	
N	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127
SAP Pearson Correlation	,601**	,684**	,600**	,505**	,731**	,601**	,620**	,655**	,673**	,674**	,584**	,527**	,637**	,608**	,691**	,662**	,547**	,692**	,691**	,608**	1	
Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000		
N	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127



Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	127	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	127	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,918	20

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
SAP1	59,5433	30,663	,545	,915
SAP2	59,6142	30,350	,639	,913
SAP3	59,6693	30,604	,542	,915
SAP4	59,7559	31,234	,441	,917
SAP5	59,6850	30,662	,698	,912
SAP6	59,7323	30,690	,546	,915
SAP7	59,6378	30,566	,566	,914
SAP8	59,7559	30,662	,609	,913
SAP9	59,5748	30,373	,626	,913
SAP10	59,6693	30,302	,626	,913
SAP11	59,6772	30,824	,528	,915
SAP12	59,8110	31,218	,468	,916
SAP13	59,6772	30,538	,586	,914
SAP14	59,6063	30,828	,557	,914
SAP15	59,8110	30,012	,642	,912
SAP16	59,8110	29,774	,603	,914
SAP17	59,8110	30,758	,480	,916
SAP18	59,6693	30,588	,652	,913
SAP19	59,6850	30,694	,652	,913
SAP20	59,6614	30,337	,546	,915

Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia

Correlations

		SDM1	SDM2	SDM3	SDM4	SDM5	SDM6	SDM
SDM1	Pearson Correlation	1	,707**	,542**	,572**	,413**	,398**	,766**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	127	127	127	127	127	127	127
SDM2	Pearson Correlation	,707**	1	,606**	,626**	,603**	,459**	,842**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000	,000
	N	127	127	127	127	127	127	127
SDM3	Pearson Correlation	,542**	,606**	1	,818**	,545**	,442**	,840**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000	,000
	N	127	127	127	127	127	127	127
SDM4	Pearson Correlation	,572**	,626**	,818**	1	,515**	,413**	,839**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,000	,000
	N	127	127	127	127	127	127	127
SDM5	Pearson Correlation	,413**	,603**	,545**	,515**	1	,628**	,773**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000		,000	,000
	N	127	127	127	127	127	127	127
SDM6	Pearson Correlation	,398**	,459**	,442**	,413**	,628**	1	,690**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000		,000
	N	127	127	127	127	127	127	127
SDM	Pearson Correlation	,766**	,842**	,840**	,839**	,773**	,690**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	127	127	127	127	127	127	127

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	127	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	127	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

		SPI1	SPI2	SPI3	SPI4	SPI5	SPI6	SPI7	SPI8	SPI9	SPI10	SPI
SPI	Pearson Correlation	,785**	,804**	,783**	,781**	,770**	,764**	,783**	,835**	,788**	,784**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	127	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	127	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,931	10

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
SPI1	28,3465	10,355	,736	,924
SPI2	28,2835	9,887	,748	,923
SPI3	28,2992	10,005	,724	,925
SPI4	28,3701	10,029	,721	,925
SPI5	28,3465	10,133	,710	,925
SPI6	28,3543	10,024	,699	,926
SPI7	28,3150	10,059	,725	,925
SPI8	28,3386	9,988	,791	,921
SPI9	28,3543	10,024	,730	,924
SPI10	28,3150	10,138	,729	,924

Variabel Komitmen Organisasional

Correlations

		KO1	KO2	KO3	KO4	KO5	KO
KO1	Pearson Correlation	1	,636**	,563**	,415**	,534**	,794**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,000
	N	127	127	127	127	127	127
KO2	Pearson Correlation	,636**	1	,644**	,594**	,492**	,848**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000
	N	127	127	127	127	127	127
KO3	Pearson Correlation	,563**	,644**	1	,420**	,425**	,770**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000
	N	127	127	127	127	127	127
KO4	Pearson Correlation	,415**	,594**	,420**	1	,590**	,770**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,000
	N	127	127	127	127	127	127
KO5	Pearson Correlation	,534**	,492**	,425**	,590**	1	,771**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000		,000
	N	127	127	127	127	127	127
KO	Pearson Correlation	,794**	,848**	,770**	,770**	,771**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	127	127	127	127	127	127

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	127	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	127	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,849	5

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
KO1	12,4882	1,982	,665	,816
KO2	12,6220	1,935	,752	,794
KO3	12,5118	2,014	,630	,825
KO4	12,6535	1,974	,620	,829
KO5	12,5591	2,010	,631	,825

Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi

Correlations

		TI1	TI2	TI3	TI4	TI5	TI
TI1	Pearson Correlation	1	,722**	,541**	,519**	,530**	,832**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,000
	N	127	127	127	127	127	127
TI2	Pearson Correlation	,722**	1	,656**	,523**	,543**	,864**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000
	N	127	127	127	127	127	127
TI3	Pearson Correlation	,541**	,656**	1	,552**	,384**	,783**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000
	N	127	127	127	127	127	127
TI4	Pearson Correlation	,519**	,523**	,552**	1	,431**	,768**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,000
	N	127	127	127	127	127	127
TI5	Pearson Correlation	,530**	,543**	,384**	,431**	1	,727**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000		,000
	N	127	127	127	127	127	127
TI	Pearson Correlation	,832**	,864**	,783**	,768**	,727**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	127	127	127	127	127	127

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	127	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	127	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,854	5

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
T11	12,8425	2,626	,724	,808
T12	12,7953	2,545	,773	,795
T13	12,8740	2,762	,658	,826
T14	12,9764	2,674	,617	,838
T15	12,8583	2,821	,570	,848

Variabel Rekonsiliasi



Correlations

		R1	R2	R3	R4	R5	R
R1	Pearson Correlation	1	,669**	,600**	,507**	,472**	,801**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,000
	N	127	127	127	127	127	127
R2	Pearson Correlation	,669**	1	,642**	,583**	,513**	,843**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000
	N	127	127	127	127	127	127
R3	Pearson Correlation	,600**	,642**	1	,860**	,333**	,878**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000
	N	127	127	127	127	127	127
R4	Pearson Correlation	,507**	,583**	,860**	1	,372**	,845**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,000
	N	127	127	127	127	127	127

	R1	R2	R3	R4	R5	R
R5 Pearson Correlation	,472**	,513**	,333**	,372**	1	,642**
Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000		,000
N	127	127	127	127	127	127
RK Pearson Correlation	,801**	,843**	,878**	,845**	,642**	1
Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
N	127	127	127	127	127	127

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	127	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	127	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

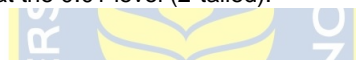
Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,864	5

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
R1	12,4488	3,170	,687	,834
R2	12,4173	3,070	,747	,820
R3	12,5984	2,687	,774	,812
R4	12,5906	2,958	,740	,820
R5	12,4646	3,600	,485	,878

	KLK1	KLK2	KLK3	KLK4	KLK5	KLK6	KLK7	KLK8	KLK9	KLK
KLK8 Pearson Correlation	,526**	,467**	,478**	,529**	,636**	,635**	,454**	1	,770**	,769**
Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000		,000	,000
N	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127
KLK9 Pearson Correlation	,570**	,511**	,530**	,611**	,592**	,566**	,545**	,770**	1	,802**
Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000		,000
N	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127
KLK Pearson Correlation	,813**	,776**	,824**	,773**	,804**	,838**	,746**	,769**	,802**	1
Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
N	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).



Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	127	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	127	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

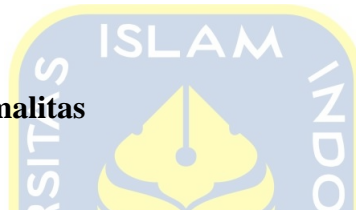
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,924	9

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
KLK1	25,2283	8,527	,760	,914
KLK2	25,2283	8,559	,711	,916
KLK3	25,2598	8,511	,774	,913
KLK4	25,2677	8,531	,706	,917
KLK5	25,3937	8,447	,744	,914
KLK6	25,2835	8,649	,795	,912
KLK7	25,4173	8,277	,656	,922
KLK8	25,2756	8,566	,701	,917
KLK9	25,2362	8,356	,738	,915

Lampiran 4 : Uji Normalitas



One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		127
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-,0180929
	Std. Deviation	,18276546
Most Extreme Differences	Absolute	,104
	Positive	,104
	Negative	-,094
Kolmogorov-Smirnov Z		1,175
Asymp. Sig. (2-tailed)		,126

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Lampiran 5 : Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-,064	,152		-,423	,673		
	SAP	,175	,083	,140	2,103	,038	,317	3,159
	SDM	,119	,052	,130	2,271	,025	,427	2,342
	SPI	,357	,066	,346	5,367	,000	,338	2,961
	KO	-,009	,066	-,009	-,139	,890	,352	2,842
	TI	,140	,056	,156	2,497	,014	,359	2,783
	RK	,245	,046	,293	5,302	,000	,460	2,176

a. Dependent Variable: KLK



Lampiran 6 : Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,061	,133		,456	,649
	SAP	-,114	,073	-,247	-1,564	,120
	SDM	,006	,046	,017	,127	,899
	SPI	,003	,058	,007	,048	,962
	KO	,007	,058	,019	,125	,901
	TI	,090	,049	,270	1,821	,071
	RK	,027	,041	,086	,657	,512

Lampiran 7 : Uji Hipotesis

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,912 ^a	,832	,824	,15223

a. Predictors: (Constant), RK, SDM, TI, SPI, KO, SAP

b. Dependent Variable: KLK

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	13,770	6	2,295	99,036	,000 ^b
	Residual	2,781	120	,023		
	Total	16,551	126			

a. Dependent Variable: KLK

b. Predictors: (Constant), RK, SDM, TI, SPI, KO, SAP



Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-,064	,152		-,423	,673		
	SAP	,175	,083	,140	2,103	,038	,317	3,159
	SDM	,119	,052	,130	2,271	,025	,427	2,342
	SPI	,357	,066	,346	5,367	,000	,338	2,961
	KO	-,009	,066	-,009	-,139	,890	,352	2,842
	TI	,140	,056	,156	2,497	,014	,359	2,783
	RK	,245	,046	,293	5,302	,000	,460	2,176

a. Dependent Variable: KLK

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	1,5684	4,0414	3,1609	,33059	127
Std. Predicted Value	-4,817	2,664	,000	1,000	127
Standard Error of Predicted Value	,016	,087	,033	,015	127
Adjusted Predicted Value	1,5706	4,0452	3,1597	,32892	127
Residual	-,41109	,48615	,00000	,14856	127
Std. Residual	-2,700	3,194	,000	,976	127
Stud. Residual	-3,049	3,621	,003	1,035	127
Deleted Residual	-,52389	,62493	,00116	,16796	127
Stud. Deleted Residual	-3,161	3,820	,005	1,050	127
Mahal. Distance	,426	40,129	5,953	6,668	127
Cook's Distance	,000	,535	,021	,074	127
Centered Leverage Value	,003	,318	,047	,053	127

a. Dependent Variable: KLK

**Lampiran 8 : Uji Statistik Deskriptif****Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean		Std. Deviation
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic
SAP	127	1,85	4,00	3,1417	,02577	,29044
SDM	127	1,50	4,00	3,0692	,03522	,39691
SPI	127	1,70	4,00	3,1480	,03116	,35115
KO	127	1,60	4,00	3,1417	,03067	,34559
TI	127	1,40	4,00	3,2173	,03571	,40239
RK	127	1,40	4,00	3,1260	,03839	,43264
KLK	127	1,56	4,00	3,1609	,03216	,36243
Valid N (listwise)	127					

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean		Std. Deviation
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic
SAP1	127	2,00	4,00	3,2913	,04199	,47326
SAP2	127	2,00	4,00	3,2205	,04017	,45274
SAP3	127	2,00	4,00	3,1654	,04296	,48409
SAP4	127	2,00	4,00	3,0787	,04124	,46473
SAP5	127	2,00	4,00	3,1496	,03369	,37961
SAP6	127	1,00	4,00	3,1024	,04158	,46861
SAP7	127	1,00	4,00	3,1969	,04189	,47207
SAP8	127	2,00	4,00	3,0787	,03809	,42922
SAP9	127	2,00	4,00	3,2598	,04064	,45796
SAP10	127	2,00	4,00	3,1654	,04148	,46741
SAP11	127	2,00	4,00	3,1575	,04096	,46163
SAP12	127	1,00	4,00	3,0236	,03947	,44480
SAP13	127	2,00	4,00	3,1575	,04096	,46163
SAP14	127	2,00	4,00	3,2283	,03903	,43986
SAP15	127	2,00	4,00	3,0236	,04396	,49545
SAP16	127	1,00	4,00	3,0236	,04932	,55584
SAP17	127	2,00	4,00	3,0236	,04536	,51122
SAP18	127	2,00	4,00	3,1654	,03668	,41334
SAP19	127	2,00	4,00	3,1496	,03549	,39998
SAP20	127	2,00	4,00	3,1732	,04622	,52090
SAP	127	1,85	4,00	3,1417	,02577	,29044
SDM1	127	2,00	4,00	2,9685	,04463	,50296
SDM2	127	1,00	4,00	3,0394	,04387	,49444
SDM3	127	2,00	4,00	3,0236	,04672	,52651
SDM4	127	2,00	4,00	3,0630	,04710	,53077
SDM5	127	1,00	4,00	3,1654	,04296	,48409
SDM6	127	1,00	4,00	3,1575	,04096	,46163
SDM	127	1,50	4,00	3,0692	,03522	,39691
SPI1	127	2,00	4,00	3,1339	,03421	,38550
SPI2	127	2,00	4,00	3,1969	,04189	,47207
SPI3	127	2,00	4,00	3,1811	,04095	,46149
SPI4	127	2,00	4,00	3,1102	,04066	,45823
SPI5	127	1,00	4,00	3,1339	,03931	,44297
SPI6	127	1,00	4,00	3,1260	,04182	,47127
SPI7	127	2,00	4,00	3,1654	,03994	,45011
SPI8	127	2,00	4,00	3,1417	,03828	,43140

	N	Minimum	Maximum	Mean		Std. Deviation
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic
SPI9	127	1,00	4,00	3,1260	,04030	,45412
SPI10	127	2,00	4,00	3,1654	,03834	,43212
SPI	127	1,70	4,00	3,1480	,03116	,35115
KO1	127	2,00	4,00	3,2205	,03859	,43486
KO2	127	2,00	4,00	3,0866	,03712	,41830
KO3	127	2,00	4,00	3,1969	,03879	,43715
KO4	127	1,00	4,00	3,0551	,04078	,45959
KO5	127	1,00	4,00	3,1496	,03885	,43787
KO	127	1,60	4,00	3,1417	,03067	,34559
TI1	127	1,00	4,00	3,2441	,04432	,49947
TI2	127	1,00	4,00	3,2913	,04487	,50569
TI3	127	2,00	4,00	3,2126	,04276	,48189
TI4	127	1,00	4,00	3,1102	,04773	,53790
TI5	127	1,00	4,00	3,2283	,04498	,50692
TI	127	1,40	4,00	3,2173	,03571	,40239
R1	127	2,00	4,00	3,1811	,04530	,51048
R2	127	1,00	4,00	3,2126	,04559	,51378
R3	127	1,00	4,00	3,0315	,05583	,62915
R4	127	1,00	4,00	3,0394	,04924	,55494
R5	127	2,00	4,00	3,1654	,04148	,46741
RK	127	1,40	4,00	3,1260	,03839	,43264
KLK1	127	2,00	4,00	3,2205	,03859	,43486
KLK2	127	2,00	4,00	3,2205	,04017	,45274
KLK3	127	2,00	4,00	3,1890	,03829	,43154
KLK4	127	1,00	4,00	3,1811	,04095	,46149
KLK5	127	2,00	4,00	3,0551	,04078	,45959
KLK6	127	2,00	4,00	3,1654	,03493	,39368
KLK7	127	1,00	4,00	3,0315	,04865	,54826
KLK8	127	1,00	4,00	3,1732	,04045	,45590
KLK9	127	1,00	4,00	3,2126	,04276	,48189
KLK	127	1,56	4,00	3,1609	,03216	,36243
Valid N (listwise)	127					